

**KAJIAN KRITIS KONSEP POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI  
DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Ushuluddin**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 4-2668 006 AF	No. REG : 4-2668/AF/006 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Oleh :**

**RAIDONG HABIBI RAMBE  
NIM: EO1304016**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT  
SURABAYA  
2008**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Penelitian yang berjudul “Kajian Kritis Konsep Politik Niccolo Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik” telah diperiksa dosen Pembimbing. Skripsi ini ditulis oleh: Raidong Habibi Rambe, dengan NIM: E01304016, Jurusan Aqidah Filsafat, telah disetujui mengikuti ujian.

Surabaya, 22 Juli 2008  
Pembimbing



**DRA. ANIEK NURHAYATI, M.SI.**  
NIP. 150273562

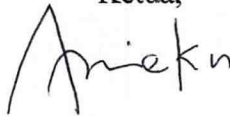
## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **Raidong Habibi Rambe** ini telah dipertahankan  
di depan Tim Penguji Skripsi  
Surabaya, 14 Agustus 2008

Mengesahkan,  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

  
Dekan,  
  
**Drs. Ma'shum, M.Ag.**  
NIP: 150 240 835

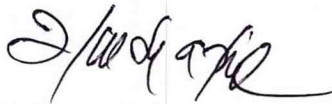
Tim Penguji:  
Ketua,



**Dra. Aniek Nurhayati, M.Si.**

NIP: 150 273 562

Sekretaris,



**Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.i.**

NIP: 150 321 631

Penguji I,

  
**Prof. Dr. HM. Djamaluddin Miri**

NIP: 150 231 825

Penguji II,

  
**Drs. HM. Acāyar, M.Si.**

NIP: 150 186 637

## ABSTRAKSI

Penelitian ini merupakan sebuah kajian filsafat politik yang lebih spesifik membahas konsep politik Niccolo Machiavelli dalam perspektif etika politik. Sebagaimana layaknya studi ketokohan, sebelum memaparkan gagasan politik Machiavelli yang ditinjau dari etika politik, terlebih dahulu peneliti mengungkap riwayat hidup, latar belakang pemikiran dan beberapa karya. Dan untuk mengetahui lebih jauh posisi mindset etika politik Machiavelli, peneliti juga menerangkan konsep politiknya.

Bila dilihat sekilas dari konsep politiknya, Machiavelli sesungguhnya menginginkan kekuasaan absolut di tangan seorang raja atau penguasa. Begitu pula tentang konsep politik yang memisahkan moral dengan politik, banyak dipengaruhi oleh setting sosial abad pertengahan yang mengerdilkan rasionalitas manusia. Dan karena itu, ia mampu membebaskan kembali filsafat politik dari segala keterikatan pada tradisi-tradisi moralitas dan keagamaan.

Dan bila Machiavelli dilihat secara utuh, dalam konteks sejarah dimana dia hidup, acuan Machiavelli sebenarnya adalah Republik Roma Kuno, yang memiliki keutamaan serta mampu menjadi pusat kekuasaan dunia. Dengan demikian, mindset etika politik ala Machiavelli pun tidak terlepas dari bangunan kekuasaan dan ketatanegaraan Roma saat itu. Akan tetapi, siapapun Machiavelli, ia merupakan sosok manusia super, yang berani melangkah lebih maju pada zamannya. Kekuasaan yang menghalalkan segala cara telah mengilhami negara-negara modern, dan meyakinkan para penguasa bahwa legitimasi negara ditentukan oleh tujuan dan cara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR ISI

Motto Hidup .....	i
Persembahan .....	ii
Abstraksi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vii

### BAB I

PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	3
3. Tujuan Penelitian .....	4
4. Manfaat Penelitian .....	4
5. Kajian Pustaka .....	5
6. Kerangka Konseptual .....	7
7. Metodologi Penelitian .....	14
8. Sistematika Pembahasan .....	19

### BAB II

ETIKA POLITIK .....	21
1. Gambaran Umum tentang Etika Politik .....	21

2. Sejarah Etika Politik .....	24
3. Legitimasi Politik .....	30
4. Psikologi Politik .....	34
5. Relasi Agama dengan Negara dalam Etika Politik .....	36
6. Etika Politik Islam .....	41

### BAB III

#### RIWAYAT HIDUP, LATAR BELAKANG, KARYA DAN KONSEP POLITIK

NICCOLO MACHIAVELLI .....	44
1. Riwayat Hidup Machiavelli .....	44
2. Latar Belakang Pemikiran .....	47
3. Karya-karya Machiavelli .....	51
4. Konsep Politik Niccolo Machiavelli .....	53
4.1. Logika Politik Machiavelli .....	53
4.2. Konsep tentang Negara .....	57
4.3. Konsep tentang Kebaikan .....	60
4.4. Penguasa dan Wewenang Kekuasaan .....	63
4.5. Etika Politik Machiavelli: Tujuan Manghalalkan Segala Cara .....	67

### BAB IV

KAJIAN KRITIS KONSEP POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI .....	72
1. Kajian Kritis tentang Etika Politik Machiavelli .....	72

1.1. Psikologi Politik Machiavelli .....	73
1.2. Etika Politik Kekuasaan .....	76
1.3. Etika Politik Kerakyatan .....	79
1.4. Sekularisme dan Machiavellianisme Politik .....	81
2. Posisi Niccolo Machiavelli .....	87
3. Kajian Kritis Perspektif Islam .....	89
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	<b>93</b>
1. Kesimpulan .....	93
2. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>97</b>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB I

### PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Latar Belakang Masalah

Seringkali orang mengatakan politik itu kejam, tak mengindahkan siapa kawan siapa lawan, semua cara dan tujuan dihalalkan. Praktek semacam ini pada dasarnya memiliki kecenderungan dengan pemikiran politik Machiavelli. Dalam hal ini, diyakini bahwa politik, tidak ada gunanya mengikuti peraturan moral.<sup>1</sup> Atas dasar pandangan seperti ini, Machiavelli telah membenarkan penggunaan sarana dan alat apapun, untuk meraih kekuasaan.

Ideologi politik ini merupakan sikap menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan adalah sikap yang dibenarkan. Selama bertahun-tahun gagasan politik Machiavelli ini telah menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering bagi banyak penguasa sejak awal d populerkannya sampai saat ini. Banyak negarawan dan penguasa dunia yang secara sembunyi atau terus terang mengakui telah menjadikan Machiavelli sebagai bapak kekuasaan. Tak terkecuali penguasan dan politisi di Indonesia, mereka secara sengaja telah mengadopsi dan mengimplementas kan gagasan-gagasan Machiavelli itu dalam kehidupan politik yang ada.

Dalam sistem pemerintahan di negara ini, perilaku politik Indonesia memiliki peranan penting terhadap berlakunya politik kekuasaan Machiavelli. Dalam konteks sejarah di Indonesia, dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam konsep politik

---

<sup>1</sup> Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Cetakan ketiga (Jakarta; Gramedia, 1995) hal 8.



kekuasaan Machiavelli, seperti halnya era orde baru. Semua orang tahu apa sebenarnya yang terjadi selama masa pemerintahan tersebut. Pada kondisi itulah politik diperankan dengan cerdas dalam merebut kekuasaan dan membelanya. Politik yang mengalirkan secara langsung mentalitas pemujaan kekuasaan secara berlebihan. Politik kekuasaan ini melahirkan musuh bebuyutan keadilan seperti kolusi, korupsi dan nepotisme, juga prinsip asal bapak senang. Sistem politik orde baru secara tidak langsung juga telah melahirkan prinsip menghalalkan segala cara.

Berdasarkan paham politik Machiavelli, penguasa negara bisa menggunakan cara binatang, terutama ketika menghadapi lawan-lawan politiknya. Ia juga bisa menggunakan sifat-sifat manusia untuk memelihara simpati rakyatnya. Tak heran banyak penguasa yang bermuka dua, di depan rakyat penguasa selalu bersikap manis, baik dan tulus, namun dibelakang rakyat, penguasa itu mengkhianatinya.

Machiavelli juga memisahkan ajaran agama dari kekuasaan, akan tetapi menyarankan agar setiap penguasa mempertahankan dan memelihara ritual ibadah keagamaan dan senantiasa melaksanakannya sebaik-baiknya. Dalam pandangan ini, agama akhirnya didudukkan pada wilayah dimana ketika ia dianggap memberikan manfaat bagi penguasa, maka ajaran agama akan dipakai.<sup>2</sup> Dan siapapun boleh menginterpretasi hukum agama berdasarkan kepentingan masing-masing. Ini membuat praktek beragama akan tergantung pada selera penguasa. Bahkan capat digunakan sebagai justifikasi kebijakan publik yang sebenarnya tidak bersumber dari

---

<sup>2</sup> Machiavelli, Niccolo, *Diskursus*, Penerjemah, Yudi Santoso dan Sovia VP, (Yogyakarta; Bentang Budaya, 2003) hal 59.

agama tersebut. Hal ini merupakan gambaran nyata dari moralitas politik yang berlaku.

Untuk mensinergikan moral dan politik, pemahaman politik yang bijaksana juga sangat penting. Politik tidak selalu identik dengan semua persoalan yang bermuara pada teknik bagaimana mendapatkan, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan. Aristoteles pernah mengungkapkan, bahwa politik juga merupakan permasalahan yang berujung pada kemampuan politisi mensejahterakan masyarakat.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya, logika politik Machiavelli bila dilihat sekilas dari kondisi sosial-politik saat itu, Ia menemukan karakter filsafat sosial (ilmu politik) baru untuk menolak regulasi aturan politik dan sosial yang merujuk pada norma moral transendental (dogma agama).<sup>4</sup> Hal ini yang luput dari pemahaman para politikus saat ini. Menggunakan konsep politik Nocollo Machiavelli, pada saat yang sama tidak menyertakan etika keutamaannya. Melainkan kebalikan dari itu, penghalalan segala cara digunakan untuk kepentingan individu dan kelompok.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pokok bahasan yang menjadi permasalahan. Sebagaimana dalam judul penelitian yang ada, penulis ingin menerangkan konsep politik Niccolo Machiavelli dalam perspektif etika politik.

---

<sup>3</sup> Deliar Noer, *Pemikir Politik di Negeri Barat*. (Jakarta: Gramedia, 1998) hal 28.

<sup>4</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik; Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Penerjemah Ahmad Baidowi dkk, Cetakan kedua (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005) hal 257.

Tentunya, pengertian tentang etika politik secara umum dapat melengkapi tujuan penelitian ini. Selain itu, untuk mengetahui lebih lengkap tentang etika politik Machiavelli, diperlukan beberapa sudut pandang, antara lain, latar belakang pemikiran dan psikologi politik.

Lebih lanjut, peneliti mencantumkan tiga pokok bahasan rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Apakah makna etika politik?
2. Bagaimana konsep politik Niccolo Machiavelli?
3. Bagaimana konsep politik Niccolo Machiavelli dalam perspektif etika politik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan makna etika politik.
2. Untuk menjelaskan konsep politik Niccolo Machiavelli.
3. Untuk mengkaji konsep politik Machiavelli dalam perspektif etika politik.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Menambah khazanah keilmuan dalam ilmu politik
2. Penelitian ini diharapkan bisa mewarnai proses dinamika politik yang sehat dan beretika.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar dari penelitian etika politik selanjutnya.

## E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang penulis temukan terkait dengan judul penelitian kali ini, yaitu (1) *Diskursus*. Penulis menemukan dalam penelitian ini, langsung dari karya Machiavelli, tokoh yang menjadi fokus bahasan dalam hal ini. *Diskursus* atau wacana, banyak membicarakan pemikiran-pemikiran politik Machiavelli secara umum. Seperti halnya, pemikiran Machiavelli tentang Negara, masyarakat, kebaikan dan kejahatan, serta kaitannya dengan doktrin agama. Dalam bahasan ini, penulis belum mendapatkan pemikiran tentang etika, serta hubungannya dengan politik secara ilmiah. Begitu juga, dengan karya (2) *Il Principe*, banyak memuat tentang nasehat-nasehat politik yang ditujukan oleh Machiavelli kepada penguasa saat itu. ST. Sularto dalam penelitiannya, (3) *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek Masyarakat*, mengupas tentang cara penguasa menata kehidupan masyarakat yang mapan dan sejahtera tanpa moralitas agama yang ada dalam satu Negara untuk mencapai tujuan politik.

Berbeda dengan Henry J. Schmandt dalam bukunya, (4) *Filsafat Politik; Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Dalam penelitian ini, Dia lebih menguraikan mengenai pemikiran filsafat politik secara historis, dari zaman Yunani Kuno hingga modern. Dalam kajiannya, dia banyak menjelentirkan semua pokok-pokok pemikiran Machiavelli, termasuk bidang politik. Berkaitan dengan itu, Deliar Noer dalam bukunya, (5) *Pemikir Politik di Negeri Barat*, hampir sama dengan Henry J. Schmandt. Deliar Noer lebih tertarik untuk membandingkan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di Barat, dengan yang ada di Timur. Ia

memasukkan Machiavelli sebagai peletak pertama pemikiran sekularisasi politik yang ada di Barat.

Selain itu, belum ada suatu kajian khusus yang meneliti pemikiran etika politik Machiavelli. Penulis meracantumkan Frans Magnis Suseno dalam bukunya (6) *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Penelitian ini sedikit menerangkan tentang itu, akan tetapi belum spesifik menerangkan pemikiran politik Machiavelli dari sudut pandang etika politik. Dia banyak menguraikan historisitas dan bangunan dasar pemikiran kenegaraan modern dari sudut etika politik. Begitu juga dengan kajian lain, dalam penelitiannya, (7) *Kuasa dan Moral*, Frans Magnis Suseno mengupas epistimologi moral dan politik lebih dalam.

Selain Magnis, (8) *Etika Politik; Pandangan Seorang Politisi Muslim* dalam penelitian Faisal Baasir, menerangkan etika politik menurut pandangannya. Ia mengkaji etika politik dalam kerangka normatif, moral-agama secara umum. Ia menjelaskan bahwa politik tidak selalu kotor, keji, penuh dengan kemunafikan, dan pada saat yang sama ia menyepakati bahwa nilai moral (nilai agama) juga sangat berperan dalam politik. Kesimpulan dari kajiannya, dari krisis politik yang berkepanjangan, ia mengharapkan kemunculan politikus-politikus yang beragama, ini terbukti dengan mencontohkan pada pribadi dirinya.

Sedangkan penelitian yang diangkat penulis adalah “Kajian Kritis Konsep Politik Niccolo Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik”. Walaupun masih berkaitan, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas. Adapun fokus kajian ini, membahas tentang teori etika dan konsep politik

Niccolo Machiavelli. Selanjutnya, memaparkan secara keseluruhan tentang konsep politiknya yang lebih khusus dan terperinci. Dari dua variabel pembahasan inilah, peneliti menemukan satu hipotesis baru, bahwa pemikiran politik Machiavelli memiliki legitimasi etis pada zamannya.

## **F. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini berjudul Kajian Kritis Konsep Politik Nicollo Machiavelli dalam Perspektif Etika Politik. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata kunci yang digunakan untuk menerangkan judul penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka perlulah diuraikan satu persatu.

### **1. Kajian Kritis**

Pada pokok bahasan konsep politik Niccolo Machiavelli dalam perspektif etika politik, peneliti menggunakan analisa wacana kritis. Dengan melihat gagasan politik tersebut sebagai bentuk dari praktik sosial yang pernah terjadi. Maksud di sini, diperlukan suatu kerangka kajian kritis terhadap pemikiran politik Machiavelli yang dinilai dari sudut pandang etika. Untuk ketajaman kajian tersebut, kajian kritis yang didukung dengan data-data historis turut melengkapi kelengkapan penelitian ini. Yaitu, dengan mendiskripsikan proses kemunculan konsep politik Machiavelli, dalam ranah filsafat politik dan juga realitas sosial-politik sebagaimana yang sudah terjadi.

Kegunaan deskripsi ini untuk menjelaskan letak kebenaran dan kesalahan, konsep politik Machiavelli yang ditinjau dari etika politik. Begitu juga dengan kajian

sejarah pemikiran Machiavelli, berguna untuk mengetahui hubungan dengan sejarah pemikiran politik yang telah ada, pun demikian, untuk memperdalam pokok bahasan tentang sumber dan penyebab utama kemunculan konsep tersebut.<sup>5</sup> Kajian historis di sini lebih tertuju pada latar belakang kehidupan, latar belakang pemikiran dan psikologi Niccolo Machiavelli sebagai manusia biasa.

## 2. Konsep Politik Niccolo Machiavelli

Konsep politik Niccolo Machiavelli tidak jauh dari paham kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Etika yang digunakan dalam politik adalah tujuan daripada politik itu sendiri. Jika tujuannya baik, maka politik tersebut tetap etis. Hal inilah yang banyak mengilhami para politisi untuk membenarkan tindakan politik tertentu dengan alasan kebaikan. Politik kekuasaan yang digunakan Machiavelli tidak lepas dari kondisi sosial politik yang dialami negara Italia saat itu. Tentunya, kekuasaan yang dipahami tidak berangkat dari pemikiran yang kacau. Akan tetapi, Machiavelli mempunyai alasan-alasan ilmiah yang membenarkan bahwa, kekuasaan dalam politik bagaikan pisau bermata dua, satu sisi bisa menggunakan cara yang baik, dan di sisi lain cara buruk juga diperlukan.

---

<sup>5</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Penerjemah Ahmadie Thoha, cetakan ketiga (Yogyakarta: Penerbit Firdaus, 2001) hal 3.



## 2.1. Etika Politik

Membicarakan etika politik memang sangat pelik. Bila dilihat sekilas, maka digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id asumsi yang pertama kali muncul adalah bahwa etika dengan politik tidak bisa didamaikan. Etika hanya membicarakan hukum moral yang abstrak, sedangkan politik membicarakan gesekan kepentingan yang memperebutkan hal yang kongkrit. Akan tetapi, etika dan politik bisa berjalan bersamaan. Sebagaimana yang digambarkan Immanuel Kant, bahwa dalam berpolitik, hendaknya seseorang menjadi secerdik seekor ular, namun harus dibatasi dengan niatan setulus seekor burung merpati.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya, etika juga sebagai kumpulan asas nilai yang berkenaan dengan perbuatan, tindakan dan sikap.<sup>6</sup> Dapat disimpulkan bahwa, pemaknaan etika semakin luas, berdasarkan perubahan pola pikir manusia tentang pemaknaan kebaikan dan keburukan.

Seperti apa yang dikatakan oleh Socrates, etika merupakan penilaian yang baik digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tidak berdasarkan sebab-akibat, akan tetapi prinsip batin atau kesenangan jiwa merupakan salah satu komponennya.<sup>7</sup> Pun demikian Aristoteles, mengatakan bahwa etika merupakan satu nilai yang memiliki tujuan kebahagiaan dalam hidup.

Sebagaimana etika, politik dapat dimaknai sebagai konsep yang berkenaan dengan soal pemerintahan. Makna politik disini mengandung nilai estetis dan nilai etis yang memerlukan seperangkat unsur, seperti halnya menjalankan pemerintahan,

---

<sup>6</sup> K. Bertens, *Etika* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal 5.

<sup>7</sup> Loren Bagus, *Kamus Fi'safat*, Cetakan ketiga (Jakarta; Gramedia, 2002) hal 217.



mengatur pola aktivitas keseharian masyarakat. Begitu juga kebijakan dan hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat. Dengan demikian hakekat politik adalah perilaku etis manusia, baik berupa perbuatan, pikir ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan alat sebuah kekuasaan.<sup>8</sup>

Aristoteles pernah mengatakan politik merupakan *mastes of science*. Maksudnya bukan dalam artian ilmu pengetahuan, akan tetapi ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami segala sesuatu, meliputi manusia sendiri, Tuhan dan tata kosmos yang ada. Baginya, dimensi politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi penting. Penilaian manusia secara politik dipengaruhi oleh faktor penilaian baik dan buruk.

Maka dari itu, politik seyogyanya dapat mengukur perilaku buruk dan baik manusia, serta mengatur perilaku hidup tersebut kearah yang lebih baik lagi.<sup>9</sup> Dalam arti yang lebih filosofis, bahwa politik memiliki peran dan fungsi ganda, dituntut untuk berbuat baik kesesama manusia, pada saat yang sama juga kebijakan negara harus mempertimbangkan kebaikan masyarakat yang lebih luasa.

Dengan demikian, politik bukanlah bertujuan untuk kekuasaan belaka, melainkan juga untuk dapat mewujudkan kesejahteraan secara umum. Bila diamati lebih lanjut, politik dan etika, merupakan sebuah relasi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya diibaratkan dua sisi yang saling membutuhkan. Ketika yang satu terapung

---

<sup>8</sup> Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dus* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2004) hal 186.

<sup>9</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta; Gramedia, 1992) hal 1

maka satu sisi lainnya akan tenggelam. Etika politik sesungguhnya bukanlah suatu sistem politik yang berbe it.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Etika politik dapat diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang seharusnya diterapkan dalam politik. Etika politik juga merupakan kewajiban hati nurani yang tidak difokuskan pada apa yang baik atau benar secara abstrak, tetapi pada apa yang baik dan benar dalam situasi yang konkrit. Etika politik bukan hanya masalah moral individual belaka, melainkan masalah moral sosial tidak bisa dilepaskan dari tindakan kolektif. Sederhananya, etika politik mensyaratkan adanya aspek penerimaan dari masyarakat yang ada.

## 2.2. Kekuasaan

Kekuasaan yang dimaksud disini adalah kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Sebagaimana kekuasaan dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakat dan alam, begitu pula kekuasaan politik, dapat dipahami sebagai ungkapan energi halus alam semesta. Kekuasaan pada hakikatnya adalah salah satu bentuk operasional tenaga gaib alam semesta sendiri. Jadi kekuasaan bukanlah sekedar bentuk hubungan antar manusia saja. Serta bukan pula gejala kehidupan masyarakat yang tak ada sangkut pautnya dengan kekuatan-kekuatan alam. Melainkan, semua kekuatan sosial dan alamiah lainnya, berakat pada kekuatan gaib atau adidunawi alam semesta sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, ..... hal 34.

Dalam politik, wajah kuasa atau kekuasaan dapat menjadi suatu hubungan, relasi, yaitu sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pihak-pihak lain untuk melakukan hal yang sebenarnya. Pengertian ini merujuk pada kuasa atas (*power over*) orang lain. Kuasa seseorang atas orang lain akan terjadi secara timpang. Kuasa ini terjadi ketika seseorang menciptakan secara rutin dampak-dampak yang lebih besar atas orang lain, namun tidak terjadi. Maka disinilah relasi kuasa bekerja atau berada. Plato menyatakan kepada Thrasymachus bahwa keadilan ialah kepentingan orang yang lebih kuat. Termasuk juga Niccolo Machiavelli, ia telah menekankan pentingnya memaksa, menekan (*force*) dalam setiap laku politik. Machiavelli menyatakan perlunya dicintai, juga ditakuti untuk mempertahankan kuasa sang penguasa. Akan tetapi, ia lebih menekankan bahwa ditakuti adalah lebih esensial bagi keberlanjutan kekuasaan.

### 2.3. Negara

Istilah negara dimasukkan dalam kerangka konseptual penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pemikiran politik Machiavelli dengan negara. Makna normatif dari negara adalah wilayah atau teritori tertentu yang merupakan satu kesatuan politis. Atau lembaga sentral yang menjamin kesatuan politis yang menata dan menguasai wilayah itu. Negara yang dibahas dalam penelitian ini adalah dalam artian kedua. Yakni sebagai pusat pemersatu masyarakat, yang menetapkan aturan-

aturan yang mengikat.<sup>11</sup> Selain itu, Negara juga memiliki batasan peran dan fungsi, antara lain; hukum dalam suatu negara merupakan kerangka dan batas kehidupan masyarakat. Satu wilayah negara harus dikuasai satu lembaga, tidak lebih. Norma-norma kelakuan yang ditetapkan oleh negara berlaku defenitif. Selain itu juga, negara harus memiliki pengakuan. Baik dari luar, maupun masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut. Pengakuan masyarakat terhadap wewenang negara untuk menetapkan hukum dan untuk menjamin keberlakuannya termasuk hakikat negara. Negara tidak segenap sistem kekuasaan, akan tetapi negara bisa berkuasa karena masyarakat bersedia untuk mengakui wewenangnya.

### 3. Perspektif Etika Politik

Judul penelitian ini adalah kajian kritis konsep politik Niccolo Machiavelli dalam perspektif etika politik. Pada pembahasan sebelumnya, peneliti sudah menerangkan sekilas konseptual tentang kajian kritis, etika politik dan juga politik Machiavelli. Penelitian ini membahas pemikiran politik yang dilihat dari sudut pandang etika politik. Materi dari etika politik yang dibahas dalam judul penelitian adalah konsep politik Machiavelli secara umum. Etika politik di sini merupakan operasional yang digunakan untuk meneliti keberadaan konsep politik Machiavelli secara ilmiah dan obyektif. Tentunya, melalui data-data yang dijadikan implikasi yang menguatkan dan melengkapi perpestif penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Ibid. hal 170.

## G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian perlu adanya metode atau jalan, karena kebenaran itu hanya dapat diperoleh dengan jalan setapak demi setapak. Dengan demikian bila tercapai silnya dalam ilmu pengetahuan itu merupakan urutan demonstrasi pembuktian yang kebenaran mulai dari asas-asasnya yang telah diketahui sedikit demi sedikit untuk mengetahui pengetahuan tentang hal yang belum diketahui. Jadi metode adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah.

Untuk itu, metode penelitian ini menggunakan kualitatif-induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dan induktif adalah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang dimulai dari pernyataan-pernyataan spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Sesuai dengan objek penelitian filsafat pada umumnya, metode ini memaparkan data berdasarkan kajian etika politik sebagai obyek kajian filsafat yang lebih menghendaki arah pembimbingan teori substantif yang berasal dari data.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian historis faktual yang membicarakan tentang tokoh politik Niccolo Machiavelli. Selain mengambil data-data kepustakaan tentang etika politik, psikologi politik, perbandingan politik, sejarah pemikiran politik, dan lainnya. Penelitian ini juga menggunakan data yang menyangkut dan

membicarakan riwayat hidup, latar belakang pemikiran, dan konsep politik Niccolo Machiavelli.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **2. Data dan Sumber Data**

Adapun data dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini tidak jauh dari judul yang ada. Secara umum, data dan sumber data yang diambil dari literatur-literatur, baik itu buku, makalah, majalah, koran, maupun data yang diambil dari website. Tentunya, yang masih berhubungan dengan penelitian ini, seperti halnya, disiplin pengetahuan tentang sejarah filsafat politik, etika politik, pemikiran politik dan lain-lain tentang judul penelitian ini.

### **2.1. Data**

Data penelitian ini adalah membahas masalah etika politik secara umum yang berhubungan dengan kehidupan, dan latar belakang pemikiran serta konsep politik Niccolo Machiavelli.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### **2.2. Sumber Data**

Kajian ini bersifat keputakaan (*library research*). Karena itu data-data yang akan dihimpun merupakan data-data keputakaan yang representatif dan relevan dengan obyek studi ini. Sumber data dalam penelitian ini meliputi primer dan sekunder.

Adapun sumber data primer bersumber dari literatur-literatur tentang etika politik dan karya-karya Niccolo Machiavelli sendiri yaitu:

1. Niccolo Machiavelli, *Diskursus*, Penerjemah, Yudi Santoso dan Sovia VP, (Yogyakarta; Bentang Budaya, 2003).
3. Niccolo Machiavelli, *II Principle (Sang Pangeran)*, Penerjemah, Dwi Ekasari Aryani (Yogyakarta; Narasi, 2008).
4. ST Sularto, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek Masyarakat* (Jakarta; Kompas, 2003).
5. Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan ke 4 (Jakarta; Gramedia, 1987).
6. Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Cetakan ketiga (Jakarta; Gramedia, 1995).
7. Henry J Schmandt, *Filsafat Politik; Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Penerjemah Ahmad Baidowi dkk, Cetakan kedua (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005).
8. Bartrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosial Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Penerjemah Sigit Jatmiko dkk (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002).

Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan etika politik dan konsep politik Niccolo Machiavelli, antara lain:

1. Robert Audi, *Agama Dan Nalar Sekuler Dalam Masyarakat Liberal*, Penerjemah YUSDANI DKK (Yogyakarta; UII Press, 2002).
2. Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat* (Jakarta; Grafindo Persada, 1996).
3. Faisal Baasir, *Etika Politik; Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2003).
4. S. P Lili Tjahyadi, *Hukum Dan Moral; Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Kanisius, 1991).
5. Abdul Munir Mul Khan, *Moral Politik Santri, Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas* (Jakarta; Erlangga, 2003).
6. Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat* (Jakarta: Gramedia, 1998).
7. Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dus* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2004).
8. Jenny Teichman, *Etika Sosial*, Penerjemah A. Sudiarja, SJ (Yogyakarta, Kanisius, 1998).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### **3. Teknik Pengumpulan Dan Analisa Data**

Teknik pengumpulan data dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan prosedur penyusunan penelitian yang memakai metode kualitatif-induktif dengan bentuk *library reseach* dalam pengumpulan data, dan wacana atau kajian kritis dalam analisa data. Dua bentuk ini diharapkan mampu menerangkan secara konperhensip tujuan dan arah penelitian ini.



### 3.1. Pengumpulan Data

Penulis penelitian ini akan menghimpun data-data yang meliputi, etika politik, konsep politik Niccolo Machiavelli, dan situasi sosial-politik pada saat itu. Hal ini dibutuhkan untuk memaparkan Machiavelli secara komprehensif, kemudian elemen-elemen yang mempengaruhi serta membentuk pemikiran-pemikirannya. Di samping itu pula penggalian lebih dalam mengenai situasi yang mengitarinya dalam dimensi eksternal, termasuk kondisi politik, budaya serta wacana yang berkembang pada masanya. Dalam hal dimensi internal, termasuk latar belakang hidup, pendidikan, evaluasi pemikiran dan paradigma yang digunakan.

Selanjutnya, data yang diperoleh diedit ulang, untuk melihat kelengkapannya dengan melakukan pengurangan dan penambahan data, yang diselingi dengan klasifikasi untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi. Untuk penggalian data, penulis menggunakan teknik library. Teknik library yang dimaksud di sini adalah pengumpulan atau pencarian data yang terdapat pada buku-buku yang berkaitan dengan etika politik dan konsep politik Niccolo Machiavelli.

### 3.2. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan satu kerangka analisis pemikiran sebagai bentuk dari praktek sosial. Maksudnya diperlukan kajian kritis terhadap konsep politik Machiavelli. Metode ini didukung dengan penggunaan metode *deskriptif-historis*. Dengan proses pencarian fakta yang menggunakan ketepatan interpretasi. Deskripsi ini menjelaskan bahwa suatu fakta, dalam hal ini

berupa pemikiran politik Machiavelli. Sedangkan kajian historis untuk mendapat keterangan mendalam tentang pengertian dan pengetahuan mengenai substansi dari peristiwa yang telah ada. Kajian historis disini lebih tertuju pada kehidupan Niccolo Machiavelli, konteks sosial yang mempengaruhinya dan juga aneka pemikiran yang turut mengkonstruksi konsep politiknya.

#### **4. Sistematika Pembahasan**

Isi pokok penelitian ini terdiri dari lima bab yang meliputi:

Bab pertama. Bab ini menerangkan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Untuk kelengkapan operasional penelitian, dalam bab ini peneliti juga mencantumkan tiga kerangka konseptual, antara lain; kajian kritis, politik Niccolo Machiavelli yang meliputi etika politik, kekuasaan dan negara. Terakhir adalah perpektif etika politik.

Bab kedua. Dalam bab ini peneliti menerangkan makna etika politik secara umum, dan sejarah etika politik. Disamping itu, peneliti menerangkan legitimasi politik, psikologi politik dan relasi agama dengan agama dalam etika politik. Untuk melengkapi kajian ini, peneliti juga mencantumkan etika politik islam.

Bab ketiga. Bab ini menerangkan riwayat hidup, latar belakang pemikiran, karya-karya dan juga konsep politik Niccolo Machiavelli yang meliputi, metodologi baru dalam politik, konsep tentang negara, pandangan tentang kebaikan. Lain dari itu,

nasehat bagi penguasa, serta tujuan politik menghalalkan segala cara merupakan satu konsep politik Machiavelli.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab keempat. Bab ini menganalisa konsep politik Niccolo Machiavelli dengan pisau analisa etika politik. Peneliti menganalisa etika politik Machiavelli dari; psikologi politiknya, etika politik kekuasaan dan kerakyatan, serta sekularisme dan Machiavellianisme politik yang berkembang pada waktu itu. Begitu juga dengan posisi Machiavelli, akan dianalisa dalam banyak sudut pandang, salah satunya adalah perspektif etika politik islam.

Bab kelima. Penutup. Dalam bab ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian di atas serta saran terhadap beberap hal yang menyangkut penelitian ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

### ETIKA POLITIK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dewasa ini pemahaman etika dan politik ibarat air dengan minyak. Keduanya sulit untuk dipertemukan dalam posisi yang sama. Etika atau moral dianggap sebagai nilai yang keserba-baik, keserba-sucian dan keserba-murnian. Sementara, politik mewakili hal-hal yang kotor, licik, intrik, manipulasi dan sejenisnya. Untuk melihat sejauh mana titik singgung dan titik pisah diantara keduanya, dalam bab ini, penulis memaparkan tentang etika politik secara umum.

#### 1. Gambaran Umum tentang Etika Politik

Berbicara etika politik sama halnya menelusuri lebih jauh jagat politik yang menggunakan nilai-nilai etis dalam suatu sistem politik. Sebagaimana etika, politik bukanlah sesuatu yang asing, apalagi menyeramkan, layaknya binatang buas yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menerkam.<sup>1</sup> Plato dan Aristoteles menjelaskan, sejatinya politik itu agung dan mulia, yaitu sebagai wahana membangun masyarakat yang baik. Sebuah masyarakat berkeadaban yang terwujud dalam tatanan sosial yang berlandaskan pada hukum, norma, dan aturan sehingga tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum.

Penerapan etika politik secara bersamaan dapat dilakukan apabila pemahaman tentang kekuasaan tidak sempit. Seperti halnya dengan politik kualitas-tinggi, atau

---

<sup>1</sup> Machiavelli, Niccolo, *Il Principe*, ..... , hal 177.

bisa disebut *high politic*, dan politik kualitas-rendah atau *low politic*. Politik kualitas-tinggi adalah politik pencapaian kekuasaan yang bercirikan kesadaran para pelakunya bahwa posisi, kedudukan, dan jabatan adalah manifestasi dari amanah masyarakat yang membutuhkan petanggungjawaban dan diorientasikan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada.

Tujuan etika politik adalah mengarahkan hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan, dan membangun institusi-institusi yang adil. Pemahaman etika politik dapat membantu menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekadar perilaku individu dalam bernegara.<sup>2</sup> Dengan pencapaian ini, etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai yang bertentangan. Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif.

Dari sini, setidaknya ada empat aspek hakekat etika politik.<sup>3</sup> *Pertama*, kekuasaan dalam politik harus dikaitkan dengan tujuan selain kekuasaan itu sendiri. *Kedua*, cara untuk mencapai tujuan diupayakan tidak menimbulkan akibat yang mengalahkan kebaikan tujuan yang hendak dicapai. Dan *ketiga*, tujuan dari mereka yang memiliki kekuasaan dalam segala bentuk dan implementasinya hendaknya adalah untuk memajukan kesejahteraan sosial.

---

<sup>2</sup> Internet, [http://tumasouw.tripod.com/artikel/etika\\_politik\\_bukan\\_hanya\\_moralitas.htm](http://tumasouw.tripod.com/artikel/etika_politik_bukan_hanya_moralitas.htm)

<sup>3</sup> Magnis Suseno, Frans, *Etika Politik*, .....hal 22.

Menurut pemahaman Machiavelli, etika politik adalah satu nilai yang berpihak kepada kekuasaan. Selama agama dapat berguna bagi pencapaian politik, maka norma-norma agama tersebut akan menjadi penting. Begitu sebaliknya, bila kesakralan agama tidak mampu bermain mata dengan kepentingan penguasa, nilai moral yang ada didalam agama tidak bermanfaat. Bagi Machiavelli, tidak ada manfaat mempersoalkan legitimasi moral kekuasaan. Yang jadi ukuran legitimasi adalah tehnik untuk merebut dan mempertahankannya. Ia menggaris bawahi bahwa etika satu-satunya dalam politik adalah kebaikan Negara, mempertahankan Negara dengan segala cara. Namun dalam hal memahami etika dan politik, Machiavelli tidak melihat adanya kontradiksi-kontradiksi nilai moral yang bertentangan dengan kekuasaan tersebut;<sup>4</sup> *pertama*, bahwa kekuasaan yang berdasarkan kebrutalan dan kelicikan dengan sendirinya akan rapuh juga.

Kekuasaan yang hanya berdasarkan faktor-faktor tersebut seluruhnya tergantung dari kekuatan pribadi seorang raja. Sebab, lawan politik juga akan menggunakan cara dan tehnik yang sama. Apabila seorang raja tidak siap akan hal itu, maka faktor-faktor tersebut akan berbalik arah. Begitu raja lengah, ia pasti jatuh dari tampuk kekuasaannya. Sebaiknya pendasaran kekuasaan politik dalam kodrat manusia, sebagaimana menurut Thomas Aquinas, tidak hanya memberikan kepada raja suatu legitimasi etis, melainkan kekuasaannya dapat langgeng karena sesuai

---

<sup>4</sup> Ibid. hal 9.

dengan kebutuhan manusia yang berkodrat sosial.<sup>5</sup> Dalam pandangannya, kekuasaan politik adalah stabil pada dirinya sendiri, karena berdasar dalam kodrat manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Machiavelli memahami kekuasaan berdasarkan teknik dan tujuan saja, dengan demikian kekuasaan tersebut secara intrinsik akan bersifat instabil. *Kedua*, Machiavelli tidak melihat bahwa stabilitas kekuasaan tergantung dari apakah kekuasaan dipandang sebagai sah atau tidak oleh masyarakat. Ia memang tau bahwa harapan rakyat harus dipenuhi. Persepsi ini teralalu sempit, jika seorang raja tidak dapat memenuhi harapan-harapan rakyat, sedangkan harapan tersebut akan terus meningkat, sehingga akan tiba saatnya seorang raja tidak sanggup lagi untuk memenuhinya. Machiavelli telah mereduksi masalah legitimasi kekuasaan, pada teknik meraih dan mempertahankan yang dengan sendirinya akan merendahkan martabat dimensi kehidupan etika politik.

## 2. Sejarah Etika Politik

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Alasan paling mendasar penelitian ini adalah upaya menghubungkan kembali keterputusan tindakan politik dengan nilai moral yang kabur dan nyaris hilang. Sebagaimana dapat dipahami, setelah manusia mengalami kebangkitan peradaban, rasionalitas menjadi ujung tombak penentu segala-galanya. Moral yang terlalu metafisik lambat laun tidak menarik lagi dalam perdebatan para ilmuwan. Dimana tindakan sosial diukur dengan metodologi sains yang positifistik. Pada kenyataannya kebangkitan rasionalitas manusia telah mengalami kebuntuan, etika yang ditanamkan

---

<sup>5</sup> Opcit. hal 5.

pada abad pertengahan tidak mampu memberikan jawaban kegelisahan manusia modern. Keberadaan agama dalam suatu negara seakan-akan menjadi penghias sejarah belaka. Masalah etika dan politik selalu dibenturkan dengan agama dan negara. Padahal sesungguhnya, etika dan politik bila dilihat dari sudut pandang filsafat moral merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan.

Pada perkembangan sejarah etika politik kekinian, tampaknya semangat moral muncul kembali. Banyak ilmuwan, politisi dan pengamat yang berpaling kepada ilmu-ilmu sosial untuk mencari jawaban kerumitan standar tindakan yang etis dan bermoral. Dengan demikian, etika menjadi sejumlah keyakinan yang ada pada masyarakat, juga sejumlah kecenderungan pribadi. Hal ini mendorong tidak saja mempelajari etika mora. yang sudah ada, melainkan juga mencari landasan baru bagi etika itu sendiri. Banyak orang berpaling kepada tradisi dan agama untuk mencari bimbingan dalam memecahkan masalah etika. Dua bidang ilmu ini memiliki keterbatasan, sehingga nilai-nilai agama dan tradisi seringkali tumpang tindih. Tradisi bisa menjadi bagian dari nilai moral yang ada pada agama, begitu juga sebaliknya, agama bagian dari tradisi yang sumber nilainya masih diberlakukan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tindakan yang etis tidak cukup disandarkan pada nilai agama dan tradisi. Suatu tindakan itu dianggap benar ataupun salah, bukan karena dianjurkan dalam agama dan tradisi. Akan tetapi baik buruk bisa saja dipelajari dari pesan moral yang disampaikan, tetapi moralitas tidak terbatas pada

---

<sup>6</sup> Virginia, Held, *Etika Moral; Pembeneran Tindakan Sosial*, Penerjemah Drs.Y Ardy Handoko, Cetakan kedua (Jakarta; Erlangga, 1991) hal 9.



tradisi ataupun agama. Selain itu, belakangan ini juga semakin banyak filosof menaruh minat pada etika terapan, yaitu etika yang menangani masalah moral, bukan menangani teori moral yang abstrak semata. Melihat berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari kaca mata etika.

Hal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membumikan nilai-nilai moral ke dalam masalah-masalah yang aktual, juga keberanian diri untuk mengambil sikap dan tindakan yang menyangkut kebajikan umum. Perkembangan ini merupakan titik balik pengakuan terhadap adanya realitas dari berbagai masalah etika yang aktual.<sup>7</sup> Tugas moral selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai keyakinan serta nilai yang dimiliki oleh agama dan tradisi pemikiran. Untuk mewujudkan itu, teori-teori moral harus berangkat dari kebutuhan manusia, yang berisi konteks historis dari sejumlah pengalaman yang sudah terstruktur sekian lama. Begitu pula dengan penelitian ini, dimaksudkan dapat menjadi penilaian etis dalam pemikiran politik.

Sejarah pemikiran etika politik jauh hari sudah ada, bahkan sebelum adanya Negara yang mengatur tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Para filsuf berusaha menjawab tentang struktur-struktur organisasi mana yang paling baik. Dalam hal ini, Plato dan Aristoteles sama-sama mempertanyakan Negara yang baik, walaupun pada akhirnya berbeda dalam jawaban. Bagi Plato, Negara yang baik adalah Negara yang merealisasikan keadilan, yang ditata secara selaras dan seimbang, dengan pimpinan yang berorientasi pada *idea* metafisik kebaikan. Dia yakin bahwa,

---

<sup>7</sup> Ibid. hal 12.

etika politik seperti itu paling sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat dan dengan demikian paling menunjang kebaikan masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Berbeda dengan Aristoteles, pendekatan etis yang dilakukannya adalah kebahagiaan.<sup>8</sup> Dengan adanya Negara, manusia dapat hidup bahagia, maka tingkah laku manusia harus memiliki keutamaan-keutamaan etis. Agar manusia dapat mengeksekusi diri dalam bernegara, harus mengembangkan bakat-bakat etis yang tertanam dalam kodratnya, hingga dapat menjadi manusia yang paling sempurna. Aristoteles menolak orientasi pada idea-idea metafisik. Dengan begitu, Negara yang paling baik adalah Negara yang organisasinya sesuai dengan fungsinya, serta dipimpin oleh orang yang berpengalaman dan memiliki keutamaan-keutamaan yang diperlukan. Harapan kedua filsuf ini jelas, yakni Negara yang paling baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Motivasi harapan tersebut merupakan suatu penilaian etis yang kebijaksana.<sup>9</sup>

Ternyata filsafat politik (etika politik) Yunani belum mengenal tuntutan legitimasi kekuasaan. Penguasa hanya dihimbau untuk berlaku bijaksana. Hal ini masih sekedar himbauan moral terhadap penguasa. Faham bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan secara etis masih asing dibicarakan. Bangunan etika politik waktu itu belum merefleksikan nilai transendental dan sama sekali belum memahami maksud dari kesejahteraan. Dalam filsafat moral ini, yang dianggap paling mulia dalam manusia bukanlah dia sendiri, melainkan *logos*, dan partisipasi untuk hal itu.

---

<sup>8</sup> Frans Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika* (Yogyakarta; Kanisius, 1998) hal 36.

<sup>9</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, ..... hal 190.

Bertolak dengan di atas, pemikiran yang mengajukan tuntutan legitimasi etis, pada fase perkembangan berikutnya menjadi sorotan dalam perbincangan etika politik. Seorang neo-platonisme, Augustinus mengajukan bahwa legitimasi etis terdapat dalam negara, yang dibedakan menjadi dua; yaitu Negara Allah dan Negara duniawi.<sup>10</sup> Pertama adalah negara Allah yang akan mencapai kesempurnaan pada akhir zaman, sedangkan kedua, adalah Negara yang akan hancur pada akhir zaman nanati. Negara sebenarnya merupakan sesuatu yang buruk, namun diperlukan karena manusia dalam keadaan berdosa di dalamnya. Karena kelemahan kesadaran moral manusia itulah diperlukan kekuasaan duniawi yang menata kehidupan manusia. Jadi, Negara bukan tujuan, melainkan semata-mata sarana penertiban manusia. Peran dan fungsi Negara hanya terbatas pada penertiban manusia yang berdosa. Negara tidak berhak untuk memerintahkan sesuatu hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah, dan dapat dibenarkan sejauh dalam batas-batas kebenaran dan keadilan.

Dengan demikian, tuntutan legitimasi etis dalam hal ini menjadi mutlak keberadaannya. Pada prinsipnya, pendekatan etis yang dilakukan Augustinus adalah usaha untuk menggambarkan hirarki nilai-nilai yang dikehendaki Allah.<sup>11</sup> Semakin manusia hidup sesuai dengan hirarki itu, semakin ia akan menikmati kebahagiaan. Namun demikian, etika politik ini belum menemukan bentuknya. Augustinus belum menawarkan kerangka untuk mengusahakan suatu perbaikan Negara itu sendiri. Dia

---

<sup>10</sup> Ibid. hal 194.

<sup>11</sup> Frans Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika*, ..... hal 76.

melihat, Negara sebagai sesuatu yang jelek, sedangkan manusia terpaksa harus menerimanya. Negara dipandang sebagai akibat dosa manusia, dan bukan sebagai realitas duniawi yang sebenarnya positif. Augustinus belum menerangkan kerangka etika politik secara teoritis.

Dalam perkembangan berikutnya, tuntutan legitimasi politik digali kembali oleh Thomas Aquinas, yang sejajar dengan Plato, Aristoteles dan Augustinus. Perhatiannya pada bidang kenegaraan dan politik, khususnya hubungan Negara dengan hukum kodrat. Dalam anggapannya, hukum kodrat adalah hukum dasar moral yang mencerminkan hukum kebijaksanaan Ilahi. Pendekatan etis ini merupakan moralitas manusia sebagai ketaatan terhadap hukum kodrat.<sup>12</sup> Dengan kata lain, hukum kodrat adalah partisipasi dalam hukum abadi, yang bukan lain kebijaksanaan Allah, sebagai asal-usul dan penentu kodrat ciptaan. Hukum positif yang dibuat manusia hanyalah sah jikalau tidak bertentangan dengan hukum kodrat. Begitu pula tindakan Negara hanya legitimit asalkan sesuai dengan norma-norma moral.

Dapat diringkas bahwa, Negara yang tidak berdasarkan hukum kodrat, akan bertentangan dengan moral. Hukum ini tidak membatasi wewenang Negara, melainkan mejadi dasarnya. Inti filsafat Negara Thomas Aquinas adalah bahwa eksistensi Negara bersumber dari kodrat manusia.<sup>13</sup> Dia menolak anggapan Augustinus, bahwa Negara hanya perlu karena kedosaan manusia. Ia kembali pada etika politik Yunani klasik, bahwa Negara berdasarkan suatu kebutuhan kodrat

---

<sup>12</sup> Ibid. hal 87.

<sup>13</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, ..... hal 198.

manusia. Thomas Aquinas mengikat tujuan Negara pada tujuan manusia, dengan menjadi kebutuhan manusia sangat penting dalam Negara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Bagi Thomas Aquinas, Negara merupakan realitas yang positif dan rasional.

Positif sesuai dengan kodrat manusia, yang mengakui dan bersedia menaatinya. Negara tidak ditaati karena orang takut terhadap ancamannya, melainkan karena fungsi dan wewenangnya dimengerti. Thomas Aquinas meletakkan dasar untuk bersifat kritis terhadap Negara. Pemikiran ini pada fase etika politik selanjutnya menjadi batu loncatan bagi pemikir-pemikir zaman pencerahan, seperti halnya politikus Italia Niccolo Machiavelli.

### **3. Legitimasi Politik**

Kekuasaan selalu berwajah dua, mempesona dan menakutkan. Legitimasi kekuasaan yang paling kuno adalah legitimasi religius. Kekuasaan diterima dan dihayati dan diterima sebagai sesuatu dari alam gaib. Implikasi yang penting dari legitimasi religius adalah bawah penguasa dalam menjalankan kekuasaannya berada di atas penilaian moral. Begitu legitimasi religius itu didobrak, muncullah beberapa pemahaman legitimasi kekuasaan yang tajam. Masyarakat Yunani telah berani mendobrak faham religius kekuasaan. Walaupun mereka belum mengenal konsep satu Negara yang memiliki teritori. Dalam lingkungan masyarakat ini, tampak

kekuasaan sebagaimana adanya. Sebagai satu organisasi masyarakat yang rasional demi kepentingan bersama.<sup>14</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Beriring dengan berubahnya pemaknaan legitimasi kekuasaan, Thomas Aquinas seorang agamawan, menggantungkan legitimasi kekuasaan Negara pada kesesuaiannya dengan tuntutan-tuntutan normatif fundamental. Sedangkan Machiavelli, sama sekali menolak pertimbangan legitimasi yang sudah ditentukan pendahulunya. Dia memiliki kriteria legitimasi sendiri, yang mana tidak semua orang dapat memahami dasar legitimasi yang diinginkannya. Maka untuk menentukan legitimasi politik Machiavelli, terasa sangat perlu menelusuri lebih jauh lagi dari aspek penilaian ataupun pengakuan masyarakat secara umum terhadap hak moral gagasan dan tindakan politik Machiavelli.<sup>15</sup>

Bila ditinjau dari obyek legitimasi politik, dapat dibedakan menjadi dua bagian. Antara lain legitimasi materi kekuasaan dan legitimasi subyek kekuasaan. Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi manfaat dan fungsinya.<sup>16</sup>  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Wewenang tertinggi dalam dimensi politik kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga sekaligus merupakan dua dimensi hakikat kekuasaan politik. Sedangkan legitimasi subyek kekuasaan menilik dari segi dasar ataupun pondasi kekuasaan seseorang, sekelompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat dan untuk memegang kekuasaan negara.

---

<sup>14</sup> Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, ..... hal 2

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta; Gramedia, 1992) hal 92.

<sup>16</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, ..... hal 54.

Pada dasarnya ada tiga macam legitimasi subyek kekuasaan. *Pertama*, legitimasi religius. Legitimasi ini mendasarkan kekuasaan pada faktor yang adi-  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
duniawi, jadi bukan pada kehendak rakyat. Dalam faham ini, penguasa dipandang sebagai manusia yang memiliki kekuatan-kekuatan ilahi, gaib, dan wewenangnya tidak dapat digannggu gugat. *Kedua*, legitimasi eliter. Legitimasi ini mendasarkan untuk memerintah pada kecakapan khusus. Aristokrat dalam hal ini termasuk legitimasi eliter, begitu pula legitimasi idiologis dan legitimasi tehokratis. Adapun legitimasi yang *ketiga* adalah legitimasi demokratis, yang mendasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

Bila ditinjau dari segi kriteria legitimasi yang dipergunakan untuk menilai keabsahan suatu kekuasaan, pada prinsipnya ada tiga kriteria legitimasi.<sup>17</sup> *Pertama*, legitimasi politik, faham ini mendasarkan keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa kekuasaan yang ada pada seseorang, kelompok ataupun penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Legitimasi ini akan merembet pada kharismatik, yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id berdasarkan perasaan kagum, hormat dan cinta. Misalnya, kalau seorang dianggap mempunyai suatu kekuatan khusus atau kesaktian. *Kedua*, legitimasi legalitas. Legalitas merupakan tuntutan etis agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu tindakan politik dianggap sah apabila sesuai dengan hukum. Adalah cukup jelas bahwa legalitas tidak mungkin merupakan tolak ukur paling fundamental bagi keabsahan wewenang politis. Karena legalitas hanya dapat memperbandingkan suatu tindakan dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Ibid. hal 57.

Sedangkan kriteria Legitimasi yang *ketiga* adalah legitimasi etis. Yang mendasarkan pada keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Hal ini merupakan unsur-unsur penting dalam pengarahannya kepada kebijaksanaan dan kesesuaian dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>18</sup> Legitimasi etis merupakan pokok bahasan etika politik yang akan dipaparkan pada pembahasan berikutnya.

Tuntutan legitimasi etis harus dibatasi terhadap dua bentuk legitimasi yang masih termasuk wilayahnya. Yaitu legitimasi pragmatis dan ideologis. Pragmatisme menolak tuntutan legitimasi etis. Ia menempatkan masalah kekuasaan kedalam kerangka pemecahan masalah, solving ataupun pengambilan keputusan berdasarkan manfaat belaka, tanpa ada pertimbangan etis. Sedangkan pendekatan ideologis, berbeda pula dengan hal yang etis. Ia merupakan satu kebijaksanaan yang mutlak diterima oleh konstituen ideologi tersebut.

Sebaliknya, prinsip-prinsip etika politik tidak bersifat mutlak melainkan selalu dapat berubah dan dipertanyakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip moral. Pendekatan ideologis merupakan pendekatan etis yang cacat karena menuntut ketaatan buta terhadap suatu ajaran dan dengan demikian justru meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban etis.

Untuk memahami hakikat legitimasi etis, perbedaan legitimasi ini perlu dilihat dari segi legitimasi legalitas dan sosiologis.<sup>19</sup> Dengan legitimasi etis, pembenaran

---

<sup>18</sup> Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, .....hal 2

<sup>19</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, ..... hal 60-66



kekuasaan politik berdasarkan prinsip-prinsip moral. Sedangkan legalitas menyangkut fungsi-fungsi kekuasaan diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Legalitas semata-mata tidak dapat menjamin legitimasi etis. Alasannya sederhana saja; legalitas hanya memakai hukum yang berlaku sebagai kriteria keabsahan. Padahal belum tentu bahwa hukum yang berlaku sendiri dapat dibenarkan secara etis.

Dengan demikian, legalitas belum menjamin moralitas politik. Perbedaan yang lain adalah, perbedaan legitimasi etis dengan sosiologis. Perbedaan ini seringkali luput dari perhatian politikus. Moralitas belum terjamin asal manusia bertindak sesuai dengan pandangan-pandangan moral yang berlaku dalam masyarakat. Jadi legitimasi etis kekuasaan politik tidak tergantung pada moralitas masyarakat tertentu, pandangan-pandangan moral yang *de facto* dianut dalam satu masyarakat, tidak juga dari apa yang dipikirkan orang, melainkan sebaliknya bertugas untuk mempertanyakannya secara kritis. Dan satu kesimpulan yang lebih kongkrit; dukungan mayoritas bagi kebijaksanaan kekuasaan politik belum menjamin harkat moral kebijaksanaan itu.

#### **4. Psikologi Politik**

Pendekatan psikologi sangat perlu kiranya dicantumkan dalam penelitian ini. Sebagai seorang politisi kondang pada zamannya, sosok Machiavelli tidak berangkat dari ruang kosong, dia pasti memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial politik pada waktu itu. Maka, untuk melengkapi penelitian ini, terasa perlu pembacaan secara

jenius dari sudut pandang psikologi politik Machiavelli dalam penelitian kali ini. Sebagaimana pendekatan psikologi, makna politik dapat didefenisikan sebagai penjelasan atas fenomena politik, dengan mangkacu pada struktur konseptual yang didasarkan pada sifat-sifat dari psikologi individu atau kelompok, dapat menjadi bagian penting dalam analisa politik.<sup>20</sup>

Para filsuf politik dari zaman Plato hingga sekarang sudah tertarik pada aspek-aspek psikologi dari perilaku manusia. Akan tetapi, belakangan ini sangat sedikit yang menggali lebih dalam teori-teori psikologi dalam menjelaskan terhadap masalah-masalah politik. Para ilmuwan politik lebih tergantung pada dongeng-dongeng psikologis yang berdasarkan akal sehat saja, daripada menggunakan perkembangan baru yang terjadi dalam bidang ilmu psikologi.

Perbedaan antara ilmu politik dan psikologi juga sangat besar, sehingga penerapan psikologi dalam analisa-analisa politik menjadi membingungkan. Meskipun demikian, bagian terpenting dari psikologi yang telah mempengaruhi penelitian-penelitian politik adalah psiko-analisa. Pemikiran Freud tersebut dapat memengaruhi ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, bahkan ilmu politik. Sumbangsih Freud terhadap ilmu politik adalah seperangkat konsep tentang aktivitas mental, seperti; represi, perasaan bersalah, frustrasi, kecemasan, rasa tidak aman dan sebagainya. Dalam pandangan Freud, manusia adalah suatu atom yang berdiri sendiri

---

<sup>20</sup> S.P Varma, *Teori Politik Modern*, Penerjemah Yohanes Kristiarto SL, Cetakan ketiga (Jakarta: Rajawali Pers, 1992) hal 41-43.

terhadap suatu aktivitas yang telah menjadi sifat dasar bawaannya. Hipotesa ini, diakui atau tidak, tetap memiliki pengaruh terhadap gagasan politik Machiavelli.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 5. Relasi Agama dengan Negara dalam Etika Politik

Sebagaimana tujuan etika politik adalah mencapai kebaikan tertinggi,<sup>21</sup> dan kebaikan tertinggi ternyata bukan kebahagiaan empiris semata, lebih dari itu, dapat diartikan sebagai arah kemana tujuan perbuatan itu sendiri. Perilaku manusia memiliki sifat lahiriah, dan akal budi, bisa disebut sebagai hukum moral yang otonom. Manusia memiliki watak moral keutamaan yang telah diperoleh untuk bertingkah laku baik secara moral. Keutamaan dalam diri manusia merupakan suatu kecenderungan yang tetap, sifat baik yang sudah mendarah daging.<sup>22</sup> Moral ini berkaitan dengan kehendak yang mengarah pada kecenderungan penilaian tertentu. Dari keutamaan inilah immoralitas manusia menyebabkan lahirnya tindakan moral yang mencapai kebaikan tertinggi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Kant, harapan moral manusia yang beragam awal dari terciptanya pranata sosial yang partikular dan basis nilai kepercayaan pada yang Ilahi. Dalam kaitan tersebut, agama merupakan suatu sistem nilai yang disebut sebagai *komunitas moral*.<sup>23</sup> Disamping komunitas moral, manusia juga memiliki komunitas politik, yang mengatur kehidupan sosial kearah yang lebih baik. Maka lahirlah hukum, suatu

<sup>21</sup> Imanuel Kant mengatakan, setiap manusia mempunyai otonomi moral, yang bersumber dari tiga postulat; tindakan kebebasan, immoralitas jiwa, dan adanya sang Ilahi. Demikian ini untuk mencapai apa yang diistilahkan Kant dengan *summon bonum* (kebaikan tertinggi).

<sup>22</sup> Bertens, K, *Etika*,..... hal 216.

<sup>23</sup> S. P. Lili Tjahyadi, *Hukum Dan Moral; Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta; Kanisius, 1991) hal 58.

tatanan yang mengatur hubungan antara manusia, sekaligus menghapus kesewenang-wenangan. Dengan manusia memiliki komunitas politik, dengan itu pula melahirkan kontrak sosial dan hukum moralitas menjadi utama dalam negara. Dari sinilah awal mula kelahiran negara, di dalamnya masyarakat hidup dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana moral, fungsi negara adalah untuk menjamin kebebasan tiap-tiap orang dalam hukum, sehingga masing-masing orang tetap bebas mengusahakan kebahagiaan dalam cara apapun yang dipandanginya amat baik, selagi ia tidak mengganggu kebebasan dan hak-hak orang lain.

Berpijak pada ajaran moralitas agama dan negara, selanjutnya akan dibahas pola hubungan agama dan negara. Dari perdebatan panjang mengenai urgensi etika dalam agama dan negara, yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk konkrit pola hubungan agama dan negara yang ideal. Tentunya perbedaan pola hubungan ini sangat tergantung dari struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat masing-masing. Secara umum, negara di belahan dunia manapun, baik itu Barat dan Timur, dapat dibedakan menjadi dua bentuk ekstrim hubungan yang saling berlawanan. Yaitu, negara sekularistik dan negara agama.<sup>24</sup> *Pertama*, negara sekularistik, menganggap agama-agama tidak berbeda dari organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Agama yang mengandung kerohanian merupakan masalah individu saja, publik tidak perlu pengakuan kepercayaan individu, dan publik hanya perlu kebahagiaan yang lahir dari kebijakan negara. Dapat dikatakan, bangunan etika politik

---

<sup>24</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, ..... hal 355.

yang pertama ini lebih mengedepankan hukum moralitas yang ada dalam negara.

Agama dipandang sebagai sistem moral yang wajib ditaati oleh individu-individu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

*Kedua* negara agama, yaitu negara yang diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama. Dalam negara agama, yang mengatur tatanan sosial kemasyarakatan adalah kitab suci, yang sudah diwahyukan Tuhan kepada nabi pilihannya. Bangunan etika politik yang kedua ini mengisyaratkan negara dalam agama. Hukum moralitas yang ada dalam negara mengikuti tata aturan agama. Karena agama sudah ada jauh sebelum negara eksis. Dari perbedaan pola hubungan di atas, dapat disimpulkan negara sekularistik maupun negara agama belum memadai. Agama adalah bagian dari realitas sosial yang amat sangat berharga, dan termasuk juga unsur hakiki untuk mensejahterakan masyarakat. Sumber nilai (etika) agama dapat menopang politik suatu negara, dan kebijakan negara akan memiliki dimensi moral yang tinggi.<sup>25</sup> Maka negara wajib bersikap positif terhadap agama, akan tetapi negara tidak bisa di agamakan, karena akan melumpuhkan usaha akal budi (etika keutamaan) manusia, dan akan menggerogoti ketulusan sikap keagamaan, serta melanggar keadilan masyarakat.

Bila dilihat dalam konteks negara yang mayoritas masyarakatnya beragama, maka hubungan antara agama dan negara jelas memiliki suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan juga disatukan. Seperti halnya Negara Indonesia, relasi yang

---

<sup>25</sup> Robert Audi, *Agama Dan Nalar Sekuler Dalam Masyarakat Liberal*, Penerjemah Yusdani dkk (Yogyakarta; UII Press, 2002) hal 66.

dijalankan harus integralistik. Pola hubungannya tetap dibedakan, antara standar moral yang universal (agama) dan standar hukum (konstitusi) dalam Negara. Di sinilah telak etika politik menjadi penting untuk ditinjau ulang. Masyarakat agama memiliki kepentingan mendasar agar agama tidak dikotori oleh kepentingan politik, karena bila agama berada dalam dominasi politik, maka agama akan sangat mudah diselewengkan. Di pihak lain, adalah kewajiban moral agama untuk ikut mengarahkan politik agar tidak berkembang berdasarkan kepentingan. Agar agama dapat menjalankan peran moral tersebut, maka agama harus dapat mengatasi politik, bukan terlibat langsung ke dalam politik praktis. Bila agama berada di dalam kooptasi politik, maka agama akan kehilangan kekuatan moralnya yang mampu mengarahkan politik agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang menekan kehidupan dan menyimpang dari batas-batas moral dan etika agama.

Bila dilacak kebelakang, perbedaan pola hubungan negara dan agama, masih berkaitan dengan proses perkembangan sosial kemasyarakatan secara umum, pun juga proses peralihan zaman kegelapan menuju pencerahan lebih khusus. Renaisan menghasilkan pemikiran modern dan kebebasan individu,<sup>26</sup> manusia bangkit setelah tertidur lama di masa kegelapan. Renaisan menghasilkan pemikiran yang rasional, dan pemahaman masyarakat yang tidak lagi melihat agama dan negara sebagai sesuatu yang sakral. Antara keduanya memerlukan pembenahan-pembenahan kearah kehidupan yang lebih baik. Selain Renaisans, kemunculan gerakan reformasi juga turut mempengaruhi pola relasi hubungan tersebut. Gerakan ini, merupakan suatu

---

<sup>26</sup> Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan*,..... hal 37.

perubahan simbol-simbol dan fungsi Gereja menuju tatanan kehidupan masyarakat sekuler.<sup>27</sup> Serta perbaikan tatanan kehidupan yang di dominasi oleh otokrasi Gereja yang menyimpang.

Perubahan sosial tersebut pada akhirnya berimbas pada politik yang mempertautkan agama dengan Negara.<sup>28</sup> Pertentangan diantara keduanya melahirkan relasi yang berbeda. Satu sisi menginginkan hubungan agama dan Negara disatukan, sisi lain mendukung pemisahannya. Yang mendasari demikian ini adalah otoritas Gereja yang di legitimasi oleh agama, bahkan seringkali melakukan penyimpangan moral demi kepentingan politik. Pada masa pencerahan, relasi agama dengan Negara menjadi sangat penting. Tarik ulur kepentingan Negara dan agama pada waktu itu sulit diidentifikasi. Kadang kala, untuk mencapai kepentingan, satu Negara ekspansi ke Negara lain dibenarkan oleh moralitas agama. Begitu juga sebaliknya, untuk penyebarluasan ajaran agama (*misi agama*) memeralat Negara menjadi hal yang paling etis.

Di sinilah posisi pemikiran Machiavelli yang banyak mengungkap kebobrokan agama. Pada saat itu, relasi negara dengan agama sering kali disamakan dengan relasi moral dan politik. Sehingga moralitas dikototasikan dengan agama, sedangkan politik adalah entitas lain. Lain dengan pemikiran politik Machiavelli, yang menyatakan bahwa moral dan politik dapat berjarak sangat jauh, juga bisa bermain mata untuk kepentingan bersama.

---

<sup>27</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*,..... hal 230.

<sup>28</sup> Machiavelli, Niccolò, *Diskursus*,..... hal 54.

## 6. Etika Politik Islam

Etika dalam pandangan Islam sering disamakan dengan akhlak, yang memiliki banyak makna sebagai ilmu yang menyelidiki segala perbuatan manusia kemudian menetapkan hukum baik dan buruk.<sup>29</sup> Lain halnya dengan Imam Al-Ghazali, mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan bermacam-macam pola laku secara spontan dan mudah; tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, terdapat kesamaan antara etika dan akhlak, yaitu sama-sama membahas kriteria baik dan buruk.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika politik adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara di mana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an. Adapun mengenai aplikasi nilai-nilai etika tersebut merujuk kepada pola kehidupan Nabi Muhammad SAW baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tatanan politik kenegaraan.

Islam dikaitkan dengan politik, maka dapat dipastikan yang muncul kemudian adalah polemik. Karena, seperti telah disinggung di atas, tidak semua pihak sepakat dengan pemaduan antara Islam dan politik. Apalagi kalau Islam dikaitkan dengan sistem kenegaraan, jelas akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak pernah ada ujungnya. Dari perbedaan pendapat tersebut, telah menimbulkan tiga

---

<sup>29</sup> Bertens, K, *Etika*..... hal 10.



paham tentang Islam dalam hubungannya dengan kenegaraan, yaitu:<sup>30</sup> *pertama*, integralistik, pandangan ini berpendapat bahwa ajaran Islam bersifat universal, yakni mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk masalah kenegaraan dan ketatanegaraan.

*Kedua*, sekularistik, pendapat ini beranggapan bahwa Islam sebagai agama harus dipisahkan dari persoalan-persoalan duniawi, termasuk masalah kenegaraan. Pengamalan ajaran Islam merupakan tugas individual, bukan komunal. Karena itu, implementasi nilai-nilai Islam tidak ada hubungannya dengan urusan negara. *Ketiga*, substantivistik, pendapat ini seakan-akan menafikan bentuk-bentuk formalistik Islam dalam sistem ketatanegaraan. Paham ini lebih menekankan pada substansi Islam dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, paham ini tidak begitu mempersoalkan bentuk suatu negara selama di dalamnya mengandung nilai-nilai Islami. Dibandingkan dua paham di atas, pandangan ketiga ini lebih moderat dan akomodatif.

Terlepas dari beberapa pemikiran politik yang ada dalam Islam di atas, legitimasi politik negara yang berketuhanan (beragama), dapat ditemukan bahwa etika politik yang berkembang adalah kekuasaan yang memiliki legitimasi religius.<sup>31</sup> Hakikat kekuasaan politik ini bersifat adiduniawi dan adimanusiawi. Kekuasaan dianggap sebagai ungkapan energi halus alam semesta dan salah satu bentuk operasional tenaga gaib alam semesta sendiri. Dalam kerangka itu penguasa dapat dipahami sebagai manusia yang mampu menyadap kekuatan-memuatan yang ada di

<sup>30</sup> Majalah MADINA (Masyarakat Dinamika Nasional), *Etika Politik dalam Al-Qur'an*, Penulis Hasan Basri Al-Mardhawi (30 Juni-06 Juli 2008) hal 4

<sup>31</sup> Magnis Suseno, Frans, *Etika Politik*, .....hal 57.

alam semesta ini. Legitimasi kekuasaan religius tak membutuhkan legitimasi rakyat, karena Allah tidak membutuhkan legitimasi dari manusia, legitimasi pada paham religius tidak bersifat etis tetapi bersifat religius dengan unsur: tingkat kesaktian, pemerintahan adil makmur dan tentram, keluhuran budinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### BAB III

## RIWAYAT HIDUP, LATAR BELAKANG, KARYA, DAN KONSEP POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI

Machiavelli lahir dan hidup dalam tradisi kekuasaan yang sudah mengalami pendobrakan atas legitimasi religius. Begitu pula pemikiran politiknya, banyak dipengaruhi oleh tradisi kekuasaan Yunani, yang kelak kemudian menjadi akar faham kekuasaan Barat secara keseluruhan. Untuk melengkapi penelitian ini, terlebih dahulu penulis mengupas beberapa karya, latar belakang hidup dan konsep politik Niccolo Machiavelli.

### 1. Riwayat Hidup Machiavelli

Machiavelli sang politikus kontroversial, ia lahir di kota Firenze, 3 Mei 1469 dan meninggal 22 Juni 1527. ia adalah seorang Florence, ayahnya seorang pengacara, tidak kaya tetapi juga tidak miskin. Ayahnya bernama Bernardo yang berasal dari sebuah keluarga ningrat.<sup>1</sup> Machiavelli memperoleh pendidikan cukup bagus, dengan khas pendidikan Italia yang mengembangkan nilai-nilai humanisme. Kemampuan dan kecakapannya dalam berdiplomasi mejadikannya diangkat sebagai konselir pemerintahan Firenze pada umur 25 tahun. Latar belakang kehidupan pribadi Machiavelli sangat sedikit diketahui. Pada tahun 1502 menikahi Marietta Corsini

---

<sup>1</sup> Russell, Bartrand, *Sejarah Filsafat Barat*, .....hal 663.

yang kelak melahirkan enam anak baginya.<sup>2</sup> Kehidupan keluarga Machiavelli kurang bahagia, yang mungkin disebabkan kesibukan politik.

Menurut Fransisco Vettori, sahabat Machiavelli, menceritakan penampilan Machiavelli dimasa muda merupakan seorang yang bertubuh langsing, mata berkilat-kilat, rambut hitam, hidung mancung, mulut selalu terkatup rapat. Kesemua itu mengesankan sosok Machiavelli sebagai pengamat dan pemikir yang tajam. Sejarah hidup Machiavelli dapat dikategorisasikan menjadi tiga periode. *Pertama* (1469-1494), pada masa ini Machiavelli memenuhi kegiatan hidupnya dengan pembelajaran, terutama studi tentang humanisme. *Kedua* (1494-1512), pada masa ini Machiavelli hidup dalam dunia politiknya. Ketika berusia 25 tahun kemampuannya menarik perhatian Gonfalonier Piero Soderini, pimpinan pemerintahan Firenze.

Machiavelli diangkat menjadi salah satu konselir Firenze, orang kepercayaan Soderini. Machiavelli masuk dalam kelompok konselir ternama, yang memiliki sejumlah kekuasaan diplomasi, prang, dan lain sebagainya. Selama 14 tahun meraih kesuksesan, termasuk ketika berhasil merebut Pisa dan mengembalikannya ke dalam kekuasaan Republik Firenze tahun 1508. Disamping tugas domestiknya, ia seringkali dikirim ke luar negeri dimana ia bisa berjumpa dengan tokoh-tokoh politik, seperti Louis XII dari Perancis, pangeran Cesare Borgia, dan paus Julius II.<sup>3</sup>

Di masa inilah bahan-bahan pemikiran dan ide-ide politiknya terkumpul. Dimana kekuasaan Piero Soderini selama empat tahun, saat itu Machiavelli

---

<sup>2</sup> Sularto ST, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek*, .....hal 7.

<sup>3</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*, .....hal 249.

memperoleh puncak karir di bidang politik, dan berakhir dengan jatuhnya Soderini di tangan keluarga De Medici. Ketika Medici memegang tahta Firenze tahun 1512, Machiavelli segera dicopot dari jabatan pemerintahan dan diusir. *Ketiga* (1512-1527), adalah masa-masa ketika Machiavelli meninggalkan panggung politik. Dalam periode ini karya-karya Machiavelli muncul. Ia dikenal sebagai pemikir politik yang paling berpengaruh dalam pemikiran politik dunia, pemikirannya dikenang hingga saat ini.<sup>4</sup>

Hal ini tak lepas dari dua karya monumentalnya, *II Principe* (sang penguasa) dan *Diskursus* (wacana). Dua buku yang diselesaikannya dengan jeda waktu lima tahun ini, membawa namanya ke dalam sebuah polemik yang dalam. Selama beberapa abad, kutukan dan cercaan terhadapnya terus menggema. Baru pada abad ke sembilan belas upaya untuk mengangkat pemikiran dan harapan Machiavelli yang sesungguhnya mulai dilakukan.

Sosok amoral politik yang ada dalam *II Principe* adalah wujud dari kegundahan Machiavelli melihat kondisi Itali di zamannya. Kondisi Italia menjadi sangat labil karena masing-masing negara bagian saling ingin merebut dominasi atas negara bagian yang lainnya.<sup>5</sup> Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya campur tangan negara-negara besar di sekitar Italia, seperti Perancis, Jerman, dan Spanyol. Kondisi yang kacau balau ini menggugah Machiavelli sebagai orang yang lahir dan mantan negarawan di Italia menyusun sebuah anjuran cara berpolitik yang ditujukan kepada Medici, sang penguasa Italia.

---

<sup>4</sup> Sularto ST, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek* .....hal 10.  
<sup>5</sup> Ibid. hal 13.

## 2. Latar Belakang Pemikiran

Dengan berakhirnya abad pertengahan dengan timbulnya Renaisans dan reformasi. Renaisans menunjukkan pada pembaharu yang timbul terutama di lapangan kebudayaan, yang tidak mau lagi mengikat diri manusia pada kegerejaan dan tradisi, serta ingin menyatakan kebebasan dan kemauan untuk maju. Begitu pula yang terjadi dengan reformasi, berkeinginan melakukan pembaharuan dalam agama. Injil mulai diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti orang banyak, dan hubungan dengan tuhan dipercaya harus bersifat langsung dan bukan dengan perantaraan pendeta. Begitu pula dengan gerakan intelektual, yang anti terhadap nilai-nilai Kristen tradisional abad pertengahan.<sup>6</sup> Orang semacam Pico dan Erasmus mengajukan perlunya pengkayaan pemaknaan injil yang lebih humanis. Krisis agama yang terjadi pada masa Renaisans lebih internal. Gereja tidak mampu lagi memenuhi harapan-harapan orang pada masa itu.

Manusia Renaisans melepaskan diri dari kungkungan gereja dan faham Skolastik. Akibatnya, pengaruh gereja sangat kurang, pemikiran lebih didasarkan pada kebebasan akal. Perubahan ini terjadi disebabkan oleh pengaruh-pengaruh yang disebarkan oleh islam yang mampu menembus kegelapan Eropa di abad pertengahan. Disamping itu, perang salib secara tidak langsung telah membuka ruang cakrawala orang-orang Eropa terhadap perkembangan-perkembangan di negeri orang lain. Sehingga moralitas tidak lagi mendapat ransangan, dan moral tidak dipedulikan,

---

<sup>6</sup> Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat* (Jakarta; Grapindo Persada, 1996) hal 37.

pengkhianatan dalam berkawan pun terjadi, nafsu untuk mendapatkan kekuasaan tanpa memerhatikan segi-segi kewajaran sangat merajalela. Dua gerakan besar yang menandai transisi dari era lama ke era baru dikenal dengan pencerahan dan reformasi. Keduanya mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku dan pandangan manusia. Nilai yang dibawa pencerahan identik dengan wilayah dunia, sedangkan reformasi gereja membawa pembaharuan dalam agama.

Semangat baru ini mempunyai pengaruh besar pada pemikiran politik zaman itu. Machiavelli sebagai putra pencerahan yang terkenal, menolak tradisi politik abad pertengahan secara keseluruhan. Dia banyak terinspirasi dari tokoh politik Marsilius yang menyajikan sisa-sisa dari ide-ide politik abad pertengahan dan benih-benih pemikiran modern.<sup>7</sup> Marsilius banyak mengikuti ide-ide Aristoteles tentang negara dan masyarakat. Yang menarik dari pemikirannya adalah anggapan antara keyakinan dan akal merupakan dua wilayah kebenaran yang sepenuhnya terpisah.

Dari sudut pandang politik, pendapat Marsilius ini adalah pemisahan antara keduanya. Dan berarti negara harus dipelajari dari sudut pandang sekuler tanpa mengacu pada aspek kehidupan masyarakat yang bersifat supranatural. Meskipun Marsilius berbicara masih dalam term-term klasik abad pertengahan, orientasi yang diberikannya pada filsafat politik nampak sekali modern. Marsilius memahami kekuasaan politik tidak dari sudut pandang etika dan intelektual, akan tetapi dari

---

<sup>7</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*, .....hal 224.

*utilitarian*.<sup>8</sup> Negara hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama semua orang.

Tujuan politik yang dicari oleh masyarakat adalah demi kebaikan umum.

Negara tidak perlu mengurus urusan etika keberagamaan, karena fungsi pemerintahan tidak cukup legitimit dari segi norma etika. Akan tetapi apakah institusi tersebut mampu memenuhi tujuan material langsung dari masyarakat. Wacana baru yang diberikan Marsilius adalah suatu pandangan politik yang berasal dari psikologi dasar manusia. Ia memahami bahwa naluri sosial sebagai dorongan biologis semata.

Tujuan naluri pada dasarnya mencakup pemenuhan keinginan fisik dan biologis. Naluri manusia tidak rasional atau bebas, ia merupakan kebutuhan yang mirip dengan keinginan binatang. Ia bangkit dari satu ambisi ke ambisi lain, dengan berusaha menghindari berbagai penderitaan.<sup>9</sup> Dengan ini, ilmu politik yang dibangun oleh Marsilius hampir tidak berhubungan dengan tingkat kepastian ilmu alam. Pemikiran Marsilius mengakibatkan hilangnya hukum alam sebagai norma bagi legitimasi politik. Hukum dalam pandangan Marsilius hanyalah produk dari kehendak manusia bukan produk akal. Sumber hukum diambil dari kehendak semua rakyat, akal tidak memiliki peran penting dalam pembuatannya.

Selain pemikiran Marsilius, reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther juga menawarkan ide-ide baru politik. Meskipun tidak dikemukakan dalam idiom politik, akan tetapi, pembaharuan agama dari otoritas paus dan lembaga gereja jelas

---

<sup>8</sup> *Utilitarianisme* adalah satu aliran etika yang lebih mementingkan kebahagiaan dari pada segala aturan atau hukum yang belum tentu memiliki tujuan lebih baik.

<sup>9</sup> Machiavelli, Niccolo, *Diskursus*,..... hal 138.



melibatkan pertimbangan tatanan politik dan sosial. Perkembangan pemikiran politik pada waktu itu dapat dilihat dari;<sup>10</sup> penerimaan doktrin nonresistensi pada kekuasaan sekuler dan justifikasi teoritis terhadap teokrasi.

Pergeseran dari doktrin nonresistensi pada doktrin oposisi aktif menentang pemerintah tirani. Dengan ide-ide baru yang diperkenalkan oleh reformasi, prinsip-prinsip tradisional menjadi sasaran kritik dari berbagai segi. Mehalirkan formulasi filsafat politik berbeda yang kemudian diwariskan oleh Barat. Pemikiran politik tidak bisa lagi dibangun dalam kerangka satu agama atau satu negara. Reformasi tidak hanya menghancurkan kesatuan agama, tetapi sekaligus mengakhiri impian tragis akan kesatuan politik juga. Kondisi historis mendorong gereja-gereja Protestan untuk bersekutu dengan negara-negara teritorial yang sedang tumbuh ke arah gerakan partikularisme politik. Selain dari itu, peletakan kedudukan tertinggi kepada penguasa sekuler turut serta mendorong kecenderungan ke arah absolutisme negara.

Pada zaman inilah Nicollo Machiavelli hidup dan dibesarkan. Ketika berumur 25 tahun ia telah memasuki kehidupan politik, kemudian pernah juga menjabat kedudukan tinggi dalam bidang diplomatik, dalam mengatur organisasi ketentaraan serta mengurus korespondensi resmi negaranya. Pada 1512 Machiavelli kehilangan pekerjaannya karena pergantian penguasa yang dilakukan dengan paksa. Setahun kemudian, Machiavelli terlibat dalam komplotan anti-pemerintahan, sehingga ia dipenjarakan dan dibuang. Ketika dimerdekakan kembali, Machiavelli pun mengasingkan diri di setumpuk tanah pertaniannya di luar kota. Disilah ia mulai

---

<sup>10</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*, .....hal 232.

menuangkan buah pikirannya kedalam bentuk tulisan. Yang paling utama diantaranya adalah *Diskursus dan IlPrinciple*.<sup>11</sup> Ia meninggal tahun 1527 dengan membawa kekecewaan karena tidak dapat memasuki arena politik kembali.

### 3. Karya-karya Machiavelli

Karya-karya Machiavelli tidak hanya di bidang politik, tetapi juga sejarah, yaitu; *History of Florence, Discourse on the First Decade of Titus Livius, a Life of Castruccio Castracani*.<sup>12</sup> Di bidang kesusasteraan, dia pernah menulis *Seven Books on the Art of War*. Tentu saja diantara karya-karyanya yang paling banyak dikenal adalah *The Prince* (1532). Isu utama dalam karya ini adalah bahwa semua tujuan dapat diusahakan untuk membangun dan melestarikan kekuasaan sebagai tujuan akhir yang dapat dibenarkan. Dan seburuk-buruknya tindakan pengkhianatan adalah penguasa yang dijustifikasi oleh kejahatan dari yang diperintah.

Karya-karya Machiavelli dalam bahasa Italia masih banyak yang belum terpublikasi, meliputi;<sup>13</sup> *Discorso sopra le cose di Pisa* (1499), *Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati* (1502), *poema in terza rima, Ritratti delle cose dell'Alemagna* (1508-1512), *Ritratti delle cose di Francia* (1510), *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* (1512-1517), *Belfagor arcidiavolo* (1515), *Discorso sopra il riformare lo stato di Firenze* (1520), *Sommario delle cose della citta di Lucca* (1520).

Karya-karya Machiavelli mengakibatkan banyak pihak yang menempatkannya

---

<sup>11</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*,..... hal 87.  
<sup>12</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*,.....hal 249.  
<sup>13</sup> Internet: [http://jv.wikipedia.org/wiki/Il\\_Principe](http://jv.wikipedia.org/wiki/Il_Principe).

sebagai salah satu pemikir brilian pada masa renaissance, sekaligus figur yang sedikit tragis. Pemikiran Machiavelli selalu diasosiasikan penuh liku-liku, kejam, serta dipenuhi keinginan rasional yang destruktif. Tidak ada pemikir yang selalu disalahpahami dari pada Machiavelli. Kesalahpahaman tersebut terutama bersumber pada karyanya yang berjudul *The Prince* yang memberikan metode untuk mendapatkan dan mengamankan kekuasaan politik.<sup>14</sup>

Dilihat dari karya-karyanya, terdapat tiga pandangan berbeda terhadap Machiavelli. Pandangan *pertama*, menyatakan bahwa Machiavelli adalah pengajar kejahatan dan immoralisme, serta pengajar amoralisme. Pandangan *kedua*, adalah aliran yang lebih moderat, melihat Machiavelli sekadar seorang realis atau pragmatis yang melihat tidak digunakannya etika dalam politik. Pandangan *ketiga*, yang memahami pemikiran Machiavelli sebagai sesuatu yang ilmiah dan pola pikir scientist. Dapat disebutkan sebagai *Galileo of politics* dalam membedakan antara fakta politik dan nilai moral.

Inovasi Machiavelli dalam karyanya adalah memisahkan teori politik dari etika.

Moralitas agama baginya adalah urusan individu, sedangkan moralitas politik menjadi urusan sosial secara keseluruhan. Hal itu bertolak belakang dengan tradisi barat yang mempelajari teori politik yang erat kaitannya dengan etika seperti pemikiran Aristoteles, yang mendefinisikan politik sebagai perluasan dari etika.<sup>15</sup>

Dalam pandangan barat, politik kemudian dipahami dalam kerangka benar dan salah,

---

<sup>14</sup> Sularto ST, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek*,.....hal 4.

<sup>15</sup> Ibid. hal 34.

adil dan tidak adil. Ukuran-ukuran moral digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia di lapangan politik. Karya-karya abad pertengahan lebih memberikan kepercayaan kepada penggunaan kekuasaan, bahwa politik hanya dibenarkan jika dimiliki oleh orang-orang yang memiliki karakter nilai-nilai luhur. Jika pemegang kekuasaan menginginkan kedamaian, maka harus bertindak sesuai dengan standar kebaikan dan etika. Begitu pula, mereka akan dipatuhi sepanjang untuk memenuhi nilai-nilai moral tersebut.

#### **4. Konsep Politik Niccolo Machiavelli**

Niccolo Machiavelli sering dikemukakan sebagai seorang pemikir yang tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Bahkan pemikir Italia ini sering disebut sebagai seorang yang mengesampingkan nilai-nilai moral untuk mempertahankan kemegahan dan kekuasaan. Machiavelli menegaskan bahwa politik mempunyai sistem nilainya sendiri, berbeda dari sistem etika perseorangan, dan kekuasaan hanyalah cara untuk mencapai tujuan yang ditentukan watak dasar manusia. Konsep politik ini merupakan hal yang baru dalam sejarah politik yang ada. Bahkan Machiavelli seringkali disebut sebagai bapak politik kekuasaan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep politik Machiavelli, penulis akan menguraikan dibawah ini.

##### **4.1. Logika Politik Machiavelli**

Disebabkan Machiavelli hidup dalam pengaruh pergolakan politik Italia, yang sedang mengalami perpecahan golongan, kota-kota dan negara bagian lainnya

menimbulkan perang yang terus-menerus. Moralitas politik saat itu sudah mencapai titik paling rendah, karena individu dan negara bersaing meraih kekuasaan. Kekacauan terjadi di mana-mana, satu nagara-kota dengan lainnya berusaha saling menjatuhkan. Begitu pula dengan rongrongan dari dalam negeri, yang masih berhubungan dengan negara-negara asing. Pada saat inilah, Machiavelli berkesempatan mengamati secara langsung. Dengan latar belakang yang penuh dengan intrik dan kekerasan inilah Machiavelli membangun filsafat politik yang menurut dia cocok pada saat itu.

Perhatian utama para pemikir politik, dari zaman Yunani hingga zaman pencerahan berkisar pada norma dan tujuan politik itu dilakukan. Mereka tertarik untuk membangun negara ideal atau mengeluarkan produk pemikiran sebagai pedoman moral bagi seorang penguasa.<sup>16</sup> Dalam bidang pemikiran politik, mereka lebih cenderung mengikuti *metode spekulatif* Plato dari pada *pendekatan empiris*-nya Aristoteles. Sejak zaman Yunani, kandungan moral dalam politik menjadi satu, akan tetapi, ilmu politik saat itu belum melahirkan satu formulasi teori yang menekankan pentingnya cara-cara dalam politik.

Dengan kemunculan Machiavelli, dikenallah metodologi baru dalam ilmu politik. Metode ini merupakan satu upaya untuk menghapuskan konteks etika secara total dari realitas politik sebenarnya. Bukan untuk merubah orientasi perilaku politik waktu itu, karena pada abad sebelumnya Aristoteles telah memformulasikan prasyarat politik. Machiavelli mengabaikan tujuan etis dalam hal arah dan tujuan negara, ia

---

<sup>16</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*, .....hal 250.

mempelajari proses politik semata demi tujuan menentukan kelayakan dari praktek-praktek politik yang stabil. Tidak peduli dengan moralitas dan imoralitas politik yang menyimpang dari moral manusia. Machiavelli melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam politik, kekuasaan merupakan suatu interaksi antar pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Seorang raja harus cerdik untuk mempengaruhi rakyat jika ingin kekuasaannya stabil. Ia menekankan cara-cara politik yang seharusnya dikaji secara ilmiah tanpa memasukkan unsur kebaikan atau keburukan tujuan politik tersebut. Dia tidak menaruh perhatian pada orientasi abad Yunani-Pertengahan yang menekankan hal-hal *apa yang seharusnya* ada dalam tatanan politik.

Metode politik Machiavelli agak paradok, di satu sisi berusaha memisahkan etika dari politik, dan pada saat yang sama melakukan penilaian etis dalam tatanan politik. Pandangannya terbingkai dalam kerangka pragmatis, akan tetapi mencakup urgensi moral tertentu, dan bahkan keharusan etis. Sebagaimana tawaran Machiavelli, metode yang terbukti paling berhasil untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan politik. Metode ini seharusnya dikaji dalam kerang ilmu pengetahuan murni secara cermat, kemudian menjadi buku panduan seorang penguasa untuk mensejahterakan rakyat.

Metode yang digunakan Machiavelli adalah metode *konparatif* dalam studi politik. Di samping itu, tetap menggunakan metode *spekulatif* (Plato), juga metode sejarah sebagai data empiris untuk menganalisa politik tertentu. Ia membandingkan

---

<sup>17</sup> Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*,.....hal 5

masa lalu dan arus besar modernitas dengan apa yang dia pahami, serta memikirkan kearah yang lebih baik dari kejadian tersebut. Penekanannya bukan pada riset murni, akan tetapi pada penemuan hukum universal. Tujuannya adalah menciptakan ilmu politik yang baru. Seperangkat peraturan yang bisa diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah secara penuh. Jadi, baginya ilmu politik merupakan suatu ilmu keahlian praktis bagi negarawan. Sejalan dengan itu, ia turut perhatian pada metodologi yang bisa diterapkan untuk menemukan rangkaian sebab dominan politik dan perilaku sosial. Diasumsikan bahwa semua tindakan manusia mirip dengan tindakan alam, karenanya tidaklah mungkin dalam politik, batang yang kecil menopang cabang pohon yang berat. Terdapat kesamaan antara perilaku manusia dengan proses alam.<sup>18</sup> Sebagaimana halnya manusia, realitas alam semesta memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Manusia hanya sebagian kecil dari kekuatan itu, ia hidup dari dan bersama dengan alam, maka secara langsung manusia mengalami ketergantungan dengan tindakan dan keinginan alam.

Atas dasar itu, hukum yang diterapkan pada salah satunya pasti juga bisa diterapkan pada lainnya. Salah satu asumsi penting dalam pemikiran ini bahwa, watak manusia tidak berubah.<sup>19</sup> Manusia sepanjang masa digerakkan oleh hasrat dan reaksinya. Manusia pasti memiliki perilaku yang sama dalam situasi yang serupa. Perubahan historis manusia bukanlah evolusioner, tetapi pengulangan abadi dari

---

<sup>18</sup> Magnis Suseno, Frans, *Etika Politik*, .....hal 33  
<sup>19</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*, .....hal 253.

situasi masa lalu. Dengan ini, Machiavelli berpaling pada sejarah, untuk menemukan hukum universal dan cara-cara politik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### 4.2. Konsep tentang Negara

Machiavelli menjadikan Negara sebagai institusi yang ada dengan kebenarannya sendiri tanpa mengacu pada tatanan yang lebih tinggi. Negara sebagai suatu konsep komunitas sosial yang legal, dipengaruhi para penguasa politik pada tingkat tertentu tidak terdapat pada pemikirannya. Tidak terdapat pula ide-ide yang dirumuskan secara khusus mengenai jangkauan fungsi Negara.

Teorinya tidak mengacu pada konsep mengenai prinsip subsidiaritas sebagai standar yang diterapkan demi kepentingan individu. Nampaknya ia menyediakan kebebasan individu sepanjang hal itu tidak mengganggu stabilitas tatanan politik.<sup>20</sup> Ketidakpercayaannya pada watak manusia mendorong dia untuk menempatkan penguasa politik bebas dari moralitas yang diterapkan dalam masyarakat. Gagasan Machiavelli tentang Negara lebih dekat dengan *Leviathan*<sup>21</sup> Hobbes dari pada persemakmuran organis.

Machiavelli mengemukakan bahwa sistem pemerintah yang baik adalah republik. Kemerdekaan dan kebebasan rakyat dalam Republik itu terpelihara. Di sini, kepatuhan kepada hukum berlaku, dilakukan dengan sopan, dan serta merta tanpa

---

<sup>20</sup> Ibid. hal 267.

<sup>21</sup> *Leviathan* adalah karya utama Hobbes tentang Negara. Dalam karya ini, Hobbes memahami Negara sebagai sesuatu yang mahakuasa. Ia juga dijuluki sebagai “manusia buatan”, dan “Allah yang dapat mati”.



paksaan apapun. Kebebasan dan kemerdekaan tidak tergantung pada persoalan siapa yang memerintah, melainkan pada rasa bebas warga-warga Negara dalam bertindak. Dalam hubungan inilah Machiavelli mengingatkan bahwa bila tidak terdapat kesadaran pada rakyat, sehingga hukum tidak dapat berjalan, maka kekerasan dalam hal ini diperlukan. Orang-orang kaya yang bermalas-malasan, rakyat yang tidak berkesadaran dengan sendirinya akan merusak Negara.<sup>22</sup> Akan lebih rusak lagi (Negara), bila orang-orang tersebut berkuasa atas golongan-golongan orang lain yang bergantung pada mereka.

Dalam konteks bernegara, Machiavelli sangat menjunjung tinggi keberadaan hukum, bahwa ketenangan dan kedamaian dapat dicapai dengan hukum, dan juga dengan kekerasan. Hukum adalah untuk kedamaian manusia, akan tetapi dengan hukum saja tidak cukup, sehingga diperlukan cara yang kedua, yaitu kekerasan. Disatu pihak, Machiavelli memang menunjukkan akan pentingnya rasa nasionalisme yang tinggi, bahkan sudah sampai mengarah pada imperialisme.

Machiavelli hidup sampai kini, oleh bangsa-bangsa berkebudayaan Barat dianggap sebagai pelopor dalam pemikiran modern dalam politik. Pemikiran Machiavelli tentang Negara dikupas lebih banyak membahas wacana negara ideal dengan romantisme masa lalu yang begitu kental. Sebut saja Roma, imperium ini menjadi kerangka pemikiran politik Machiavelli untuk menunjukkan bentuk negara ideal yang diinginkannya. Menurut Machiavelli, Roma berhasil mengatur negaranya dikarenakan negara itu merubah tata pemerintahannya menjadi republik. Dan

---

<sup>22</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik*, .....hal 91.

nampaktelah ada kedewasaan pada setiap substansi yang ada dalam negara, baik rakyat, penjalan roda pemerintahan, dan militer.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Ia sangat mengagungkan Negara yang berbentuk republika. Semua Negara yang menguasai kekuasaan dan mengontrol manusia adalah berbentuk republik dan kerajaan.<sup>23</sup> Walaupun terdapat bentuk Negara yang telah ada sebelumnya. Pada masa Yunani sistem yang lain juga sudah menjadi pembicaraan serius, semisal Negara yang berbentuk aristokrat, demokrasi, dan kerajaan.

Namun bagi Machiavelli latar belakang satu Negara yang ideal harus meliputi tiga sistem diatas. Hal itu dikarenakan republik dapat menutupi apa yang menjadi kelemahan tiga sistem tersebut. Ketiga bentuk pemerintahan itu memiliki kelemahan yang sangat fatal bila diterapkan satu persatu. Kelemahan itu menurut Machiavelli terletak pada penguasaan dalam sistemnya. Aristokrasi yang dipimpin oleh beberapa orang pada akhirnya akan menemukan bentuknya pemerintahan oligarki. Demikian juga sistem demokrasi akan dengan mudah menjadi sebuah bentuk pemerintahan yang anarkhi, dikarenakan yang memerintah begitu banyaknya. Sedangkan, sistem kepangeranan, akan dengan mudah berubah menjadi tirani.

Itulah sebabnya Machiavelli tidak setuju terhadap ketiga bentuk pemerirtahan tersebut. Karena tidak capat membentuk negara yang adil dan sejahtera. Lain halnya dengan Negara republik, akan dapat mengatasi kelemahan dalam ketiga sistem lainnya. Tentunya tak lepas dari pembagian kekuasaan negara yang digunakan oleh sistem republik. Yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi pada berbagai

---

<sup>23</sup> Machiavelli, Niccolo, *Il Principe*, .....hal 17.

struktur pemerintahan yang satu dengan lainnya. Yang mempunyai hubungan sederajat, tidak saling membawahi, akan tetapi berhubungan secara fungsional dalam usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>24</sup> Seperti halnya pembagian kekuasaan yang ada di republik Roma saat itu, yang terdiri dari; dewan penasihat, pemegang kekuasaan. Dan lembaga lain, seperti dewan daerah dan dewan pertahanan.

Pembagian kekuasaan ini dapat membawa pada penjagaan ketertiban. Korelasi ketertiban dan pembagian kekuasaan terletak pada mekanisme yang menampilkan *cek and balance* di dalam negara.<sup>25</sup> Fungsi dari itu ada pada dua substansi utama, yaitu antara senat dan konsul, sedang bagian yang lain menjadi tambahan saja. Perimbangan kekuasaan itu terjadi karena masing-masing (senat dan konsul) memiliki hak *veto* yang dapat menentukan satu kebijakan disetujui atau tidak. Namun yang perlu diperhatikan dalam sistem republik ini adalah sistem ini tak dapat berdiri tegak tanpa adanya upaya menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Dua pemegang kekuasaan di atas harus berupaya sebaik mungkin untuk membuat satu kebijakan yang didasarkan pada kepentingan rakyat. Inilah kenapa republik dapat menjadi satu sistem yang dapat menutupi kelemahan bentuk pemerintahan lainnya.

#### 4.3. Konsep tentang Kebaikan

Untuk memahami pemikiran Machiavelli tentang kebaikan tidak perlu menakai terminologi tradisional, karena akan menyulitkan dalam pemaknaannya. Akan tetapi,

---

<sup>24</sup> Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, .....hal 172.

<sup>25</sup> Russell, Bartrand, *Sejarah Filsafat Barat*, .....hal 667

istilah-istilah yang digunakan Machiavelli yang sudah menjadi istilah umum dalam sejarah pemikiran politik dapat dimaknai lebih jelas. Dalam konsep Yunani kuno tentang kebaikan umum, terdapat *dua* unsur pokok; kebaikan haruslah untuk semua orang, bukan bagi keuntungan penguasa tertentu. Dan apa yang baik bagi masyarakat adalah apa yang berakar dalam hukum alam, bukan atas dasar kehendak sewenang-wenang manusia. Machiavelli menerima pendapat pertama dan menolak yang kedua.

Kebaikan yang dipahami oleh Machiavelli adalah kebaikan yang memiliki nilai keutamaan dan orientasi yang lebih fokus pada manusia itu sendiri.<sup>26</sup> Standar etika demikian ini tidak menyoroti tindakan yang sesuai dengan norma moral. Selanjutnya, Ia mengatakan, pemimpin politik tidak boleh bertindak untuk keuntungannya sendiri, tetapi untuk kebaikan semua orang. Perbedaan Machiavelli dengan arus utama pemikiran Barat tidak begitu besar, tetapi yang mencolok adalah sisi konsistensi penyamaan antara keberhasilan dengan kebaikan. Pada umumnya, kebaikar atau keburukan adalah masalah yang harus ditentukan dalam sinaran hukum alam dan hukum ketuhanan.

Dengan menolak standar ini, Machiavelli melepas ide kebaikan umum dari sumber moral.<sup>27</sup> Penolakan tersebut tidak berangkat dari pemahaman yang kosong. Hukum moral yang dogmatis-religius dari Gereja pada waktu itu terlalu mengekang sikap dan tindakan manusia. Kebaikan yang ada hanya ketentuan-ketentuan etis yang bersumber dari moral agama. Pihak Gereja tidak menerima standar etika diluar itu.

---

<sup>26</sup> Bertens, K, *Etika*,..... hal 212.

<sup>27</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*, .....hal 261

Akibatnya, pemikiran tentang kebaikan umum yang ditawarkan Machiavelli dianggap amoral, karena akan merusak sistem etika politik yang ada. Machiavelli menyatakan, jika penguasa bertindak karena cinta pada tanah airnya, maka upaya ini merupakan kebaikan umum. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, dia mengatakan, “*seorang penguasa dalam memerintah rakyat, hukuman lebih berharga daripada kebaikan*”.<sup>28</sup> Berbeda dengan kaum tradisional, bahwa penguasa yang bertindak demi rakyat, tidak berarti tindakannya baik pula. Sebaliknya, yang bisa dikatakan baik, apabila tindakan tersebut memenuhi unsur publik. Istilah *kebajikan* yang digunakan Machiavelli menimbulkan pemaknaan yang sulit. Bila ditelusuri genealogi istilah ini, nampak jelas bahwa, Machiavelli menggunakan term ini dalam makna politik murni yang tidak mempunyai signifikansi etis.

Ia menggunakan istilah *virtu*<sup>29</sup> hampir sepenuhnya mengacu pada cara-cara yang digunakan penguasa untuk mencapai tujuan politik. Dengan demikian, raja yang bijak adalah penguasa yang berhasil, efisien dan mumpuni. Apakah ia mencapai tujuannya dengan korup, licik, atau bahkan berkhianat tidak menjadi persoalan, sepanjang tindakannya demi kebaikan umum. Karena itu, seorang penguasa Sisilia, Agathocles dikritik olehnya dikaremanakan membunuh warganya sendiri dan mengkhianati temen-temennya. Perbuatan demikian dalam pandangan Machiavelli mengejikan, dan tindak keburukan, karena untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kebaikan negara.

<sup>28</sup> Machiavelli, Niccolo, *Diskursus*, .....hal 379.

<sup>29</sup> Virtu adalah keutamaan. Atrinya, penilaian (baik dan buruk) yang bersumber dari sifat watak yang dimiliki manusia. Secara historis-filosofis, ‘virtu’ merupakan suatu konsep etika yang tertua.

Machiavelli juga menimbulkan kebingungan dengan pernyataannya bahwa raja harus jujur. Pernyataan ini tidak lebih dari ekspresi sikap pragmatis bahwa, kejujuran adalah kebijakan yang terbaik.<sup>30</sup> Alasan untuk jujur dalam kehidupan masyarakat bukanlah suatu sikap etis yang benar. Karena kejujuran bisa saja suatu tindakan yang menguntungkan dalam kondisi tertentu.

Dari sini dapat dinilai bahwa, kebaikan umum yang diungkapkan Machiavelli masih berkaitan erat dengan tujuan politik. Sebagaimana manusia biasa, yang memiliki kelebihan dan kekurangan, bila digali lebih dalam lagi, Machiavelli merupakan pencari nilai-nilai yang berarti dan baik. Yaitu nilai yang senantiasa bermakna kebaikan umum, dan standar-standar etis lainnya. Secara psikis, ia juga tidak melupakan aspek kejujuran, yang secara substansial adalah kebijakan itu sendiri. Nilai kejujuran dalam hal ini merupakan sebagai dasar nilai politik. Yang lebih sederhana, kebaikan ataupun kejujuran seseorang merupakan kepalsuan dari manusia politik untuk menggapai kekuasaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **4.4. Penguasa dan Wewenang Kekuasaan**

Dapat di katakan kalau apa yang dia sarankan kepada raja adalah ungkapan ketidaksenangan Machiavelli terhadap kondisi Italia yang terpecah-pecah. Namun yang menarik adalah bahwa Machiavelli sepakat kalau tugas raja adalah menciptakan kemakmuran bagi bangsa Italia. Dalam konteks pada masa itu, peran raja yang

---

<sup>30</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*, .....hal 262

dituntut oleh Machiavelli adalah untuk menyelamatkan rakyat Italia yang telah menderita karena serbuan bangsa asing.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Tulisan Machiavelli yang ditujukan kepada penguasa saat itu adalah bentuk dialog dan sarsan seorang rakyat biasa kepada seorang raja. Saran yang mengungkapkan beberapa cara untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan memperluas kekuasaan. Tentulah Machiavelli harus memilih kata-kata serta menyusun kalimat yang tidak menyinggung perasaan raja namun tetap agar apa yang ingin diungkapkan dapat tersampaikan kepada raja.

Machiavelli menganjurkan agar Medici menjadi seorang pemimpin yang handal, pemimpin yang baik, cerdas dalam segala tindakannya. Seorang raja yang baik haruslah orang yang terikat pada prinsip-prinsip moralitas. Karena pelaksanaan hukum tersebut dapat mengantarkan pada kebaikan umum.<sup>31</sup> Melihat Italia yang terpecah belah, satu keinginan Machiavelli yang ingin disampaikan pada Medici adalah persatuan dan ketertiban harus diperjuangkan dengan menempuh berbagai cara, bahkan pembantaian sekalipun diperbolehkan dalam logika ini.

Namun selebihnya tidak, jika kondisi tertib dan masyarakat sudah bersatu, maka segala kekerasan dan kekejaman adalah hal-hal yang harus dihindari oleh seorang penguasa. Dua kekuatan yang harus diwaspadai oleh seorang penguasa, salah satunya adalah rakyat. Ketika kondisi telah kondusif maka penguasa harus sebisa mungkin menjaga perasaan rakyat. Yang kedua adalah serangan dari luar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukanlah tentara-tentara yang kuat dan tangguh.

---

<sup>31</sup> Ibid. hal 268.

Fungsi tentara tidak hanya untuk menahan serangan dari musuh, juga sebagai penjaga keamanan dan ketertiban negara, baik dari dalam maupun luar. Penyebab terbesar dalam keruntuhan sebuah Negara adalah ketidakpatuhan terhadap seni perang. Seorang raja harus mengetahui metode-metode tersebut.<sup>32</sup> Untuk melatih pikiran itu, dia harus membaca sejarah dan mempelajari tindakan-tindakan yang dilakukan orang-orang hebat, serta mengamati penyebab kemenangan dan kekalahan mereka.

Seorang raja hendaklah tidak mempunyai tujuan atau pikiran lain, kecuali soal perang. Sebab hanya itulah kepandaian yang diperlukan oleh seorang yang memerintah. Dan sebaliknya, bila raja lebih berfikir tentang kemewahan dibandingkan alat perang, ia akan kehilangan negaranya. Penyebab utama kehilangan Negara adalah pandangan remeh tentang kepandaian berperang.<sup>33</sup> Ketika penguasa menggunakan kekuatan perang dengan tentara asing, maka setelah perang usai pasukan bayaran itu dibantai habis. Kejahatan itu diperlukan demi keselamatan Negara. Jika ia menampakkan kebaikan, justru akan membahayakan dan membawa kehancuran. Dengan demikian, seorang raja tidak perlu bermurah hati kepada musuh untuk membuat dirinya tersohor.

Machiavelli selanjutnya menjelaskan, sikap kejam seorang raja sangat diperlukan, karena dengan itu ia menjadikan kerajaannya lebih baik. Dengan usaha memulihkan keamanan dan kekuatan rakyat. Raja tidak perlu khawatir terhadap kecaman yang ditimbulkan karena kekejamannya, selama tujuannya untuk

---

<sup>32</sup> Machiavelli, Niccolo, *II Principle*, .....hal 105.  
<sup>33</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik*, .....hal 92.



mensejahterakan rakyat Seorang raja juga sebagai pemimpin tertinggi pasukan, maka tanpa kekejaman tidak akan pernah dapat mempersatukan dan mengatur pasukan. Cara tersebut justru ia semakin ditakuti dan dihormati pasukannya. Dengan demikian seorang raja harus mengandalkan kekuatan pada dirinya, dan bukan apa yang ada pada orang lain.

Menurut Machiavelli, ada dua cara berjuang, yaitu melalui hukum dan kekerasan. Cara pertama bagi manusia, dan cara kedua adalah cara binatang. Seorang raja harus bersikap kadang-kadang sebagai manusia, dan kadang sebagai binatang, tak ubahnya seperti ruba dan singa. Sementara itu, untuk menghindari kebencian dari rakyat, maka seorang raja harus menunjuk orang lain untuk melaksanakan tindakan yang kurang menyenangkan rakyat. Seorang raja mestinya mengetahui dengan baik bagaimana bertindak seperti binatang, hendaklah meniru ruba dan singa. Kerena singa dapat melindungi dirinya dari serigala.<sup>34</sup> Oleh karena itu orang hendaklah menjadi ruba agar bisa mencium perangkap. Seorang penguasa yang bijaksana hendaklah memahami fungsi keganasan singa dan kecerdikan ruba. Hendaknya juga dia patuh pada hukum dan moral, karena tindakan demikian itu paling terpuji dihadapan rakyat. Walaupun demikian, sifat moral tersebut seringkali terbukti tidak cukup untuk mengatasi masalah. Jika diperlukan, raja boleh memakai cara licik dan kejam. Oleh karena itu, penguasa yang ingin sukses, langgeng mempertahankan kekuasaan, harus melengkapi diri dengan seribu cara, terlepas cara baik dan buruk.

---

<sup>34</sup> Ibid. hal 96.

Kekuasaan seorang raja tidak dilihat dalam figur saja, lebih dalam lagi suatu rezim atau institusi. Lebih jelasnya, negara yang memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan atau republik. Bentuk negara tersebut rentan terhadap rongrongan dari berbagai pihak.<sup>35</sup> Dikarenakan itu, Machiavelli mengajukan empat syarat yang harus diwaspadai oleh penguasa; bila kekuasaan seorang tidak bisa dihentikan, bila Negara dalam keadaan yang tidak diharapkan, bila Negara dalam keadaan kekurangan, dan bila Negara penuh korupsi. Machiavelli tidak berpendapat bahwa kekuasaan kerajaan lebih baik daripada pemerintahan rakyat. Atau sebaliknya juga, pemerintahan rakyat lebih baik daripada pemerintahan kerajaan. Ia hanya menunjukkan, bagaimana kekuasaan seorang raja dapat dibangun dengan baik.

#### **4.5. Etika Politik Machiavelli: Tujuan Manghalalkan Segala Cara**

Niat dan tujuan Machiavelli pada intinya adalah kebaikan rakyat Italia. Secara teoritis, kerangka logika yang dibangun masih mengikuti tradisi kuno dalam membedakan antara kerajaan dan tirani. Kerangka pikir yang pertama merupakan penjelmaan terhadap etika politik kerakyatannya, yang banyak dituangkan dalam pemikiran-pemikiran tentang sistem pemerintahan yang baik dalam suatu Negara. Sedangkan kerangka pikir yang kedua, berbicara tentang etika politik kekuasaan, untuk memenuhi kepentingan dan pengelolaan kekuasaan sang penguasa.

---

<sup>35</sup> Sularto ST, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek* .....hal 46.

Penguasa yang baik adalah orang yang tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Akan tetapi demi tanah air yang menjadi milik semua rakyat.<sup>36</sup>

Pandangan yang dikedepankan untuk mencapai tujuan sosial dan politik tidak bisa dikesampingkan terhadap pandangannya tentang kebaikan umum. Demi tujuan yang baik, semua cara yang diperlukan bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang penguasa tidak wajib mempertanyakan etis dan tidaknya tindakan politik. Satu-satunya pembatas adalah keharusan menggunakan untuk tujuan yang benar (*Common Good*). Pandangan Machiavelli tentang tujuan dan cara bertolak belakang dengan tradisi kuno. Ia sendiri mengakui inovasi radikal dalam pendekatannya; “*saya sendiri melepaskan diri dari prinsip-prinsip yang dibangun oleh pendahulu saya, tetapi tujuan saya adalah menuliskan sesuatu yang bisa dipakai oleh mereka yang mau memahami*”<sup>37</sup>.

Machiavelli berusaha menghindari dari kesulitan logis, yang terdapat dalam masalah tujuan dan cara, serta melepas hukum-hukum politik dari regulasi moralitas. Ia acuh terhadap nilai agama, bahkan mengancam praktek etika politik pada zamannya. Akan tetapi, ia memperkenalkan sekaligus membenarkan dua nilai moral, yang satu dikenakan bagi penguasa, dan yang lain untuk individu. Nilai moral yang pertama membenarkan segala tindakan penguasa dalam rangka memelihara dan memperbesar

---

<sup>36</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*, .....hal 257.

<sup>37</sup> Machiavelli, Niccolo, *Il Principe*, .....hal 56.

kekuasaan. Sedangkan nilai moral yang kedua, menyangkut tindakan penguasa secara perseorangan dalam kelompok sosial.<sup>38</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Karakter dari filsafat sosial yang radikal ini menolak regulasi politik yang merujuk pada norma moral transendental. Dia melihat kekuasaan politik sebagai kekuatan independen yang diatur oleh hukum secara fungsional. Terlepas dari semua prinsip moral yang bisa diterapkan pada tindakan pribadi manusia. Filsafat politik Machiavelli membuka pintu bagi kekuasaan Negara menjadi tidak terbatas. Untuk doktrin menghalalkan segala cara, Machiavelli tidak konsisten terhadap politik yang sejatinya berhubungan dengan eksistensi hukum alam.<sup>39</sup> Sebagaimana politik, alam memiliki kesamaan dengan tingkah laku dan keinginan manusia. Machiavelli tidak memahami lebih jauh nilai politik yang dimiliki manusia secara antropologi politik. Ia hanya mengasumsikan bahwa hasrat kuasa manusia tidak jauh berbeda dengan binatang.

Obsesi Machiavelli selanjutnya, bahwa tujuan politik adalah untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan. Segala usaha untuk menyukseskan tujuan itu dapat dibenarkan. Legitimasi kekuasaan membenarkan segala teknis pemanipulasian dukungan masyarakat terhadap kekuasaan yang ada dan pemisahan antara prinsip, moral, dan etika. Prinsip-prinsip ketatanegaraan didasarkan pada adanya perbedaan antara moral dan tata susila merupakan suatu kemungkinan yang diharapkan, sedangkan ketatanegaraan adalah suatu yang dihadapi sehari-hari.

---

<sup>38</sup> Sufarto ST, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek* .....hal 35.

<sup>39</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*, .....hal 259.

Tata nilai yang ada dalam agama (Kristen) banyak membicarakan sikap dan perilaku hidup yang tidak realistis. Oleh karenanya, politik tidak perlu memperhatikan bidang moral. Politik mengharuskan konsep yang baik, yakni kemerdekaan sosial, keamanan, dan konstitusi yang memiliki hak hukum secara adil dihadapan raja dan rakyat. Bila mana konsep-konsep tersebut aplikatif dan solutif, maka politik yang digunakan juga baik. Agar tujuan politik tersebut berjalan dengan mulus dan tepat sasaran, dibutuhkan seribu cara. Akan sia-sia memperjuangkan sebuah tujuan politik dengan metode-metode yang tidak menjamin keberhasilan.<sup>40</sup> Jika ingin mencapai tujuan harus memilih cara yang tepat, berdasarkan konteks penerapan politik yang ada. Sebagaimana Machiavelli, persoalan cara bisa dikaji secara ilmiah, tanpa mempertimbangkan kebaikan ataupun keburukan tujuannya. Meraih tujuan politik memang merupakan suatu kebutuhan. Untuk itu, harus mengakui pendapat Machiavelli bahwa cara dalam politik merupakan faktor penting dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Harapan Machiavelli adalah untuk mencari seorang yang dapat menjadi penguasa yang sebenarnya. Ia sosok yang ingin memberikan pemikirannya dalam politik ketatanegaraan Italia, yang pada waktu itu dalam keadaan tidak stabil, banyak penguasa yang korup dan rakus akan duniawi. Pemikiran tersebut membuat asumsi masyarakat bahwa Machiavelli adalah orang yang menganjurkan berbuat jahat dan mengabaikan nilai-nilai moralitas demi kekuasaan dan kelanggengan kekuasaan.

---

<sup>40</sup> Russell, Bartrand, *Sejarah Filsafat Barat*, .....hal 669.

Hanya saja Machiaveli mengeluarkan pendapatnya secara terang-terangan. Jadi pendapat masyarakat itu tidak sepenuhnya benar.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **BAB IV**

### **KAJIAN KRITIS KONSEP POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Paham kekuasaan Machiavelli di akhir abad ke-17 menjadi pegangan para penguasa diktator. Pada perkembangan selanjutnya, muncul gagasan untuk melihat kembali pemikiran Machiavelli, sekaligus mempertimbangkan kondisi sosial dan politik kemunculan pemikiran tersebut. Terlepas dari pengakuan yang bijaksana, signifikansi konsep politik Machiavelli terhadap demokratisasi politik saat ini patut diapresiasi dengan semangat demokratis. Dalam bab ini, peneliti berusaha menilai sosok Machiavelli dari banyak aspek secara obyektif. Diantaranya adalah posisi konsep politik Machiavelli dalam perkembangan situasi politik yang ada.

#### **1. Kajian Kritis tentang Etika Politik Machiavelli**

Machiavelli tidak banyak menaruh perhatian pada orientasi etika politik Yunani-Pertengahan, yang menekankan aspek moral dalam politik. Bangunan etika politik Machiavelli, yang coba dipaparkan penulis dalam bab ini, menggunakan pendekatan yang paradok. konsep politik Machiavelli satu sisi berusaha memisahkan etika dari politik, dan pada saat yang sama ia melakukan penilaian etis dalam wilayah politik juga. Selain itu, peneliti juga mencoba menerangkan dari aspek psikologi Machiavelli.

### 1.1. Psikologi Politik Machiavelli

Tak banyak pemikir politik serupa dengan Machiavelli pada zamannya. Bila ditinjau dari sudut pandang psikologi, melalui pendekatan intrinsik subyektif yang mendasari perilaku politik Machiavelli. Sebagaimana manusia biasa, Machiavelli merupakan pencari nilai-nilai yang berarti baginya. Nilai-nilai yang senantiasa bermakna kehormatan, pengakuan, pendapatan dan keamanan. Bisa dikatakan, Machiavelli adalah sosok yang merindukan kejayaan dan reputasi sebagaimana manusia lain. Dia juga tidak melupakan aspek kejujuran, yang secara substansial dapat berarti kebijakan moral. Dalam hal ini, nilai moralitas dan kejujuran merupakan legitimasi basis kekuasaan. Pada pengertian yang lebih dalam, seseorang akan merasa bahwa kejujuran tidak lain merupakan kepalsuan dari manusia politik dalam rangka menyembunyikan agresifitasnya untuk meraih kekuasaan.<sup>1</sup>

Berbeda dengan Machiavelli, secara psikologis dapat dinilai sebagai manusia yang tidak normal. Selain tampak dalam dirinya rasa kecewa yang tinggi, namun kejujurannya patut dihormati. Dengan kata lain, Machiavelli berkeinginan mengajak masyarakat untuk tampil berani, terbuka dan berkata apa adanya. Jadi, nilai kejujuran yang ada pada Machiavelli bermakna ganda. Satu sisi, dengan nilai tersebut dia berkeinginan *show up* terhadap agitasi politiknya, dengan menunjukkan *sifat merasa lebih tinggi*. Disisi lain, nilai kejujuran lebih bersifat sosial dari pada politis. Walaupun demikian adanya, politik merupakan permainan orang-orang yang menderita penindasan yang berat pada awal kehidupannya. Dengan mencoba bertahan,

---

<sup>1</sup> S.P Varma, *Teori Politik Modern*, ..... hal 267



yang kemudian melahirkan suatu tindakan yang melewati batas normal manusia.

Hal yang menarik bahwa, hampir semua studi tentang manusia dalam politik; para penghasut, teoritis dan para administrator adalah mereka yang mempunyai keperibadian patologis.<sup>2</sup> Bila hal ini yang membentuk kehidupan politik, maka akar-akar pemberontakan dan perilaku anarkhis akan tampak dalam personalitas politik. Memahami Niccolo Machiavelli sama artinya dengan melakukan studi khusus terhadap psikologi seorang praktisi dan pemikir politik akhir abad pertengahan. Ia harus ditempatkan sebagai sosok yang melakukan terobosan baru dalam pemikiran yang serba dogmatis. Ia tidak hanya berfikir dan bertindak pada masanya, lebih dari itu, ia menjadi inspirasi, sadar atau tidak, bagi setiap sosok politisi. Anggapan bahwa ia adalah sosok pemikir atau guru yang jahat adalah hal yang biasa, begitu pula sebaliknya yang melihat Machiavelli sebagai orang baik.

Sebagai manusia biasa, Machiavelli merupakan sosok yang luar biasa, terlihat dari konstruksi pemikirannya. Sebagai figur sejarah, sulit memahami kejahatan maupun kebajikannya, ia memiliki peran kebaikan dalam menelanjangi selubung kebohongan yang menutupi manusia abad pertengahan. Metode Machiavelli dalam berpolitik merupakan suatu tindakan politik yang membutuhkan seribu cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Klaim bahwa seorang memiliki sifat yang licik, penipu, amoral dalam berkuasa.<sup>3</sup> Pemikiran ini seringkali dikaitkan dengan Machiavelli, yang memahami bahwa manusia berwatak suram dan rendah,

---

<sup>2</sup> Ibid. hal 269.

<sup>3</sup> Machiavelli, Niccolo, *Diskursus*,.....hal 3.

jahat dan tidak tahu terima kasih, pembohong yang liha , iri terhadap keberhasilan orang lain.

Manusia adalah binatang yang didorong oleh kepentingan diri sendiri, ketamakan pribadi, ketakutan, kesombongan, dan nafsu akan kekuasaan. Dengan sifat kebinatangan, manusia berbuat seperti binatang, dan dengan sifat rasionalnya, ia bertindak seperti manusia.<sup>4</sup> Dengan itu manusia bisa menggunakan karakter dan kualitas binatang yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dan kepentingan. Dapat dikatakan bahwa Machiavelli belum tuntas memahami manusia. Ia tidak meninjau ulang peran akal budi manusia dalam berpolitik. Implikasi logis dari pandangan tersebut sangat jelas, ia memisahkan dua watak yang berbeda, dengan menempatkan pada derajat yang sama, antara kejelekan manusia dan rasionalitasnya.

Pandangan ini menempatkan sisi rasional manusia untuk melayani prinsip-prinsip binatang, sehingga akal menjadi instrument semata-mata untuk memuaskan keinginan lahiriah belaka. Dengan demikian, manusia bisa menjadi makhluk yang lebih berbahaya dibandingkan binatang buas yang paling ganas.<sup>5</sup> Secara politis, maksud tersebut merupakan satu upaya yang dilakukan Machiavelli untuk menerangkan bagaimana seorang politikus bisa banyak belajar dari semua hal yang baik dan buruk. Maka dari itu, penguasa yang berharap dapat mempertahankan kedudukannya, harus belajar bagaimana hal-hal yang tidak baik dilakukan, dan mempergunakan pengetahuan tersebut dengan baik pula.

---

<sup>4</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*,.....hal 255.

<sup>5</sup> Machiavelli, Niccolo, *Il Principe*,.....hal 111.

## 1.2. Etika Politik Kekuasaan

Politik kekuasaan Machiavelli merupakan dasar filsafat politik, yang terangkum dalam pemikiran-pemikiran politiknya. Sejauh yang dipahami dalam sang penguasa ialah, tidak berlakunya nilai susila, nilai agama, dan nilai masyarakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, bagi penguasa hanya berlaku satu tujuan, yakni keberhasilan dalam mempertahankan dan memperbesar kekuasaan. Politik kekuasaan baginya, adalah suatu cara seorang pemimpin yang dapat membela kekuasaannya, menjaga stabilitas keamanan negara dan juga kekuatan untuk mengatur masyarakat. Kekuasaan politik dipahami sebagai ungkapan energi dalam segenap kekuatan masyarakat dan alam.<sup>7</sup> Machiavelli adalah seorang pemikir yang realis, tampil berhadapan dengan realitas politik, dunia kekuasaan dan dunia penataan negara. Menghindari keterpecahan, mencegah invasi pihak-pihak luar, mengalahkan musuh yang mengancam kekuasaan pemerintahan, serta mempertahankan keutuhan negara adalah persoalan konkrit yang dihadapi oleh Machiavelli.

Menurutnya, seorang politikus yang memikirkan pembelaan atas negaranya, serta memikirkan bagaimana menjadi manusia yang utama, seringkali tampil sebagai orang yang tidak realistis. Orang tersebut justru masuk ke dalam kehancuran dirinya sendiri, keluarga, pemerintahan dan negaranya. Keutamaan dalam tindakan politik adalah aneka kecerdikan, untuk menaklukkan musuh, memperdaya para pengkhianat,

---

<sup>6</sup> Sularto ST, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek*,..... hal 73

<sup>7</sup> Magnis Suseno, Frans, *Etika Politik*,..... hal 34.

menjaga kesatuan dan keutuhan rakyatnya, membela dan memperkokoh tahta kekuasaannya.

Seorang raja perlu melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang bertentangan dengan keutamaan manusiawi, dan tidak perlu merasa bersalah, karena kekuasaan yang dimilikinya adalah kekuasaan absolut. Semangat ini dapat dilihat adanya prinsip tujuan yang menghalalkan setiap cara. Lebih jelasnya, demi membela keutuhan negara atau keselamatan tahta pemerintahan, seorang pemimpin dapat melakukannya dengan segala bentuk cara. Bahkan Machiavelli mengatakan bahwa, kelicikan dan ketidakjujuran jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan kekuatan bagi orang yang ingin bangkit dari kondisi buruk menuju kejayaan besar.<sup>8</sup> Machiavelli adalah seorang yang mengerti dan cerdas dalam mengatur strategi untuk merebut kekuasaan dan membelanya. Dari sinilah dapat dilihat bahwa, kekuasaan ala Machiavelli merupakan sebuah mentalitas yang memuja kekuasaan atau menomorsatukan kekuasaan.

Dibalik konsep politik tersebut, sebenarnya Machiavelli juga mengungkap cara-cara penguasa mempertahankan absolutisme kekuasaan. Konsekuensinya adalah bahwa gagasan Machiavelli akan sangat penting menjadi pisau analisa politik kekuasaan dalam negara *authoritarian*.<sup>9</sup> Berbeda jauh dari tujuan Machiavelli tentang negara mandiri, banyak para penguasa pada akhirnya terjebak pada politik kekuasaan semata. Padahal Machiavelli juga membedakan bagaimana seorang penguasa bertindak pada masa damai dan masa darurat. Ia telah memberikan pemikiran tentang

---

<sup>8</sup> Machiavelli, Niccolo, *Il Principe*,.....hal 118.

<sup>9</sup> Authoritarian adalah suatu sistem pemerintahan yang menggunakan kekuasaan Negara secara absolut.

perlunya pengaturan keadaan darurat dalam suatu negara. Hal itu yang kemudian menginspirasi banyak negara, dapat dilihat dewasa ini hampir tidak ada negara yang tidak memiliki undang-undang darurat. Meskipun dalam pemberlakuannya mendelegasikan kekuasaan kepada pihak militer.

Kekuasaan yang dipahami Machiavelli tidak stagnan, akan selalu mengalami perubahan kearah yang lebih labil dan stabil, berdasarkan situasi dan kondisi Negara. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa Machiavelli tidak pernah mendefinisikan kekuasaan, akan tetapi dialah pemikir pertama yang mengangkat masalah kekuasaan sebagai persoalan eksplisit filsafat Negara. Pada perkembangan selanjutnya, pemikiran ini dilanjutkan oleh Thomas Hobbes secara lebih rinci dengan titik pijak yang sama, yaitu pencarian dasar untuk mengatur masyarakat yang lebih stabil.<sup>10</sup>

Tujuan Machiavelli mendewakan politik kekuasaan saat itu adalah murni untuk kepentingan politik praktis semata. Oleh karena itu, ia menyingkirkan factor-faktor lain, seperti agama, etika, ekonomi dan sosial. Faktor ini tidak dapat digunakan sejauh tidak dapat mendukung tujuan politik. Politik penghalalan segala cara adalah untuk kebaikan negara dan rakyat. Karena rakyat tidak menilai penguasa menurut apakah pemimpin mempergunakan kekuasaan sesuai dengan hukum, etika ataupun agama.<sup>11</sup> Melainkan apakah kekuasaan tersebut menunjukkan ciri-ciri yang diharapkan rakyat. Berarti kekuasaan politik itu menjadi kebal terhadap tuntutan legitimasi etis.

---

<sup>10</sup> Sularto ST, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek*,.....hal 49

<sup>11</sup> Magnis Suseno, Frans, *Etika Politik*,.....hal 41.

### 1.3. Etika Politik Kerakyatan

Machiavelli seringkali salah dimengerti, ia dianggap amoral, karena dicurigai menganut paham politik menghalalkan segala cara. lebih lanjut lagi istilah Machiavellianisme kerap kali dikonotasikan sebagai segala pikiran, sikap, dan tindakan kotor dalam politik. Anggapan tersebut, disebabkan kekeliruan dalam memahami pemikiran politik Machiavelli. Padahal sebagaimana disebutkan dalam *diskursus*, pemikiran-pemikiran Machiavelli lebih filosofis, jika diterjemahkan sebagai mindset politik yang bersifat kerakyatan. Dia mengungkapkan, *kita tahu yang baik itu apa, tetapi kita sering tidak mampu melakukannya, salah satu yang baik dan dapat dilakukan adalah system pemerintahan Republik.*

Untuk melakukan uraian tentang pemikiran politik yang berpijak kepada kerakyatan, Machiavelli menuturkan *Res Publica*,<sup>12</sup> yang pada intinya adalah menekankan betapa pentingnya menjunjung tinggi azaz kerakyatan, terutama dalam sistem pemerintahan republik. Pemerintahan ini dapat disebut dengan sebuah kerajaan sipil. Yakni dalam arti republik Roma sebagai *res publica* atau susunan sistematis antara pemerintah dan warga Negara. Selain itu, republik dalam arti sempit, yang dikhususkan oleh para republik Roma, didasarkan atas politis dan sipil, atau praktek kewarganegaraan.<sup>13</sup> Selain semangat kerakyatan yang tinggi, Machiavelli memahami bahwa, suatu Negara mutlak membutuhkan hukum, guna penegakan disiplin sosial. Supremasi hukum merupakan hal yang sangat penting

---

<sup>12</sup> Res Publica adalah semangat kerakyatan yang mutlak harus dijunjung tinggi oleh para penguasa.

<sup>13</sup> Sularto ST, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek*,.....hal 42

dalam Negara. Penguasa dan rakyat harus sama rata dihadapan hukum. Jasa seseorang tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kejahatannya, untuk tidak mengadili, tidak menghukum, atau bahkan meringankan hukumannya. Machiavelli banyak terinspirasi terhadap keadaan Roma yang sedang mengalami kegemilangan. Pemahamannya tentang sistem pemerintah kerajaan dipelajari dari para penguasa yang ternama selama menjadi senator.

Sebagaimana yang terjadi di Eropa, sistem pemerintahan yang feodal seringkali menjadi masalah, terlebih lagi apabila sistem itu menindas.<sup>14</sup> Feodal yang akhirnya menjadi tirani adalah tidak lebih daripada sindikat atau komplot elit pemerintah saja. Berdasarkan apa yang dikatakan Machiavelli, tirani dan oligarki jika dilawan oleh rakyat akhirnya akan menjadikan sebuah negara bersistem demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah kerajaan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini, suara rakyat adalah suara Tuhan menjadi semacam kalimat populer untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Dalam *Diskursus*, Machiavelli mengungkapkan bahwa suatu kerajaan melalui beberapa fase; dari feodal, menuju kerajaan oligarki, yang kemudian melahirkan demokrasi, dan pada akhirnya akan menjadi sistem yang anarki. Sistem pemerintahan yang ideal menurutnya adalah, ramuan dari keenam pola pemerintahan yang hari ini ada di dunia, yaitu; kerajaan, aristokrasi, demokrasi, tirani, oligarki, dan Anarki.<sup>15</sup> Karena masing-masing pola mempunyai kelebihan dan kekurangan.

---

<sup>14</sup> Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan*,.....hal 41.

<sup>15</sup> Machiavelli, Niccolo *Diskursus*,.....hal 12.

Menurutnya, seorang raja harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Selain itu, raja juga harus memikirkan penggantinya, untuk menerima tongkat estapet kekuasaan.<sup>16</sup> Dengan sendirinya pula, rakyat akan mengerti manipulasi dan tipu daya seorang raja. Ketika rakyat menjadikan jabatan raja itu turun-temurun, maka timbullah kerajaan genetik kekeluargaan. Namun kualitas keturunan raja sering kali merosot, tak sehebat raja sebelumnya, mungkin kerana keturunan itu tidak perlu lagi berjuang seperti pendahulunya.

#### 1.4. Sekularisme dan Machiavellianisme Politik

Dengan munculnya paradigma baru, berupa rasionalitas yang mampu menggeser paradigma teokratis warisan tradisi Yunani klasik. Beriringan dengan itu pula muncul sebuah gerakan baru yang memproyeksikan visi perubahan negara secara radikal. Semangat bernegara pada masa transisi abad pertengahan memunculkan dua prinsip pemisahan antar agama dan negara.<sup>17</sup> Prinsip pertama, bahwa penguasa merupakan wakil rakyat dengan lingkup kekuasaan yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Prinsip lain, bahwa komunitas politik bukan terdiri dari hak-hak pribadi dan individu-individu, melainkan hak-hak dewan perwakilan. Pengertian hak warga Negara dan pembatasan konstitusional terhadap kekuasaan para raja menjadi sekuler, tatkala pengertian tersebut berkembang menjadi teori kontrak sosial. Selama abad pertengahan, masyarakat dan para raja sepakat bersama

---

<sup>16</sup> Russell, Bartrand, *Sejarah Filsafat Barat*,.....hal 664.

<sup>17</sup> David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Penerjemah Setiawan Abadi, Cetakan ketiga (Jakarta; LP3S, 1988) hal 72.



membentuk perjanjian-perjanjian dalam satu konstitusi bersama. Kemudian muncullah Negara modern, yang berdasarkan prinsip sekularisasi di ruang sosial dan politik. Sejak itulah hak-hak rakyat menjadi perhatian utama politik. Pencerahan universal haruslah pemerintahan perwakilan, yang dikenal dengan demokrasi politik.

Secara historis, kemunculan sekularisasi tidak bisa dilepaskan dari munculnya pergolakan pemikiran dari belenggu mitologi. Pergolakan tersebut melahirkan sejumlah perubahan mendasar dalam cara berfikir manusia. Sejarah pemikiran manusia pun menemukan ruang kebebasannya, melalui suatu gerakan Renaisans. Gerakan yang berusaha untuk kembali memperjuangkan seluas-luasnya bagi manusia untuk berfikir bebas dan mandiri, terlepas dari berbagai dominasi, dan pengaruh nilai-nilai agama yang dogmatis.<sup>18</sup>

Terlepas makna dasar dari istilah sekuler, sekulerisasi politik dalam banyak hal merupakan satu wilayah yang paling banyak mendapat perhatian. Lebih khusus, sekulerisasi politik lebih berkaitan dengan pola hubungan antar agama dan Negara. Tujuan sekulerisasi dalam politik hanya untuk mempertajam pemahaman bahwa politik, sesungguhnya merupakan produk manusia. Serta upaya untuk mendesakralisasikan nilai-nilai politik. Dengan demikian, politik berarti bersifat *profan*, pun demikian dengan urusan Negara dan agama menjadi wilayah yang berbeda, sebagaimana pemisahan duniawi dan ukhrawi. Sekulerisasi yang sudah berkembang sejak abad pertengahan, menunjukkan arah perubahan hal-hal yang

---

<sup>18</sup> Listiyono Santoso, *Teologi Politik*,..... hal 147.

bersifat adi-kodrati dan teologis menjadi hal yang ilmiah. Atas dasar pengertian ini, politik dapat dipelajari dengan metode ilmiah empiris.<sup>19</sup>

Lebih jauh lagi, desakralisasi politik Machiavelli turut pula membuka jalan bagi kemunculan berbagai pemikiran tentang demokratisasi politik. Kemunculan zaman modern turut mendorong ilmu politik ke arah yang lebih dinamis dan transformatif. Tokoh-tokoh peletak dasar konsepsi demokrasi, seperti halnya Locke di Inggris, Montesquieu di Prancis, berangkat dari sebuah asumsi yang pada dasarnya mengikuti alur pikir Machiavelli. Sebagaimana sosok Machiavelli, pemikir politik modern tidak ingin memandang dunia politik secara teologis-romantik. Mereka ingin menyingkap realitas kekuasaan seje-as-jelasnya dan sebagaimana adanya.<sup>20</sup> Seperti yang dilakukan oleh para ahli fisika di zaman pasca-Renaissance yang ingin mengungkapkan rahasia gravitasi bumi.

Melalui cara pandang Machiavelli, desakralisasi politik mampu mengeluarkan pola pikir manusia dari keterkungkungan dogmatis. Para pemikir modern tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang kenyataan politik. Akan tetapi selangkah lebih jauh, untuk sebuah proses justifikasi konsepsional yang harus disusun bagi pembatasan kekuasaan penguasa. Niccolo Machiavelli mengejutkan tradisi sosial dan adat-istadat barat yang menjadi proyek garapan segelintir pemikir pada waktu itu.<sup>21</sup> Filsafat politik Machiavelli bersifat ilmiah dan empiris, yang bersumber dari pengamatan kehidupannya sendiri. Machiavelli membuka jalan baru bagi pemikiran politik yang

---

<sup>19</sup> Pardoyo, *Sekularisasi Dalam Polemik* (Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1993) hal 20.

<sup>20</sup> Rizal Mallarangeng, *Wajah Lain Machiavelli*, (Kompas; hari senin, 06 Oktober, 1997) hal 4.

<sup>21</sup> David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*,.....hal 77

sekuler. Sehingga teori politik menjadi praktis, dan kebutuhan-kebutuhan akan kehidupan politik seringkali mengharuskan terjadinya pelanggaran hukum moral.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Machiavelli adalah peletak dasar ilmu politik baru, juga pemikir awal yang mendorong terjadinya proses sekularisasi politik pada zamannya. Machiavelli berkata bahwa tujuan dia menulis pemikiran yang kontroversial bukanlah untuk mengatakan apa yang seharusnya. Proses kekuasaan adalah bagian dari kenyataan alamiah yang harus dimengerti sebagaimana keinginan manusia untuk mengerti dan menyingkap berbagai hal lainnya di alam nyata. Pola pemikiran politik yang teosentrik merupakan gambaran dari sistem masyarakat yang feodal. Pola pikir antroposentris telah membawa dia, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang lebih humanis.<sup>22</sup> Bisa dikatakan secara sangat sederhana, Machiavelli telah mendahului Francis Bacon, filsuf dan negarawan Inggris peletak dasar empirisme. Tetapi melalui dasar penafsiran Machiavelli sebagai ilmuwan, sesungguhnya bisa dimengerti lebih jauh dari hal itu, yaitu sebagai sebuah analisis yang dingin terhadap berkerjanya mesin politik dan proses kekuasaan yang riil.

Dengan kata lain, konsep Machiavelli dalam mempertahankan kekuasaan, haruslah dimengerti bukan sebagai *nasehat politik*, lebih daripada itu merupakan sebuah pernyataan faktual bahwa, dunia kekuasaan memang tidak semurni dunia mitologi. Penolak simbiosis pemikiran politik dan ide-ide teologis yang pada zaman itu menjadi dasar pembenaran bagi kekuasaan tradisional. Tapi jelas bahwa, dalam konteks sejarah pemikiran, analisis politik Machiavelli yang dingin tersebut,

---

<sup>22</sup> Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan*,.....hal 40.

merupakan sebuah pertanda dari terjadinya pergeseran paradigmatik dalam memandang politik dan organisasi kekuasaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Machiavelli banyak dikenal karena konsep politiknya yang telah memutus mata rantai abad pertengahan dengan masa Renaisans. Machiavelli berpendapat bahwa kekuasaan hendaknya dipisahkan dari agama dan Tuhan. Tidak ada relevansi antara kekuasaan dengan teologi, kecuali apabila agama itu memiliki nilai guna bagi kekuasaan dan negara. Selama bertahun-tahun gagasan politik dan kekuasaan ala Machiavelli telah menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering bagi banyak penguasa sejak awal konsep politiknya dipopulerkan. Banyak negarawan dan penguasa dunia yang secara sembunyi atau terus terang mengakui telah menjadikan buku Machiavelli itu sebagai *hand book*. Mereka mengadopsi dan mengimplementasikan konsep politik itu dalam kehidupan politiknya sehari-hari.

Machiavelli merupakan satu dari beberapa orang yang harum dan suci namanya sebagai bapak ilmu politik. Sosok Machiavelli hingga kini masih dipahami sepihak.<sup>23</sup>  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Dia dianggap merumuskan patokan moral tujuan menghalalkan segala cara. Namanya dikutip selalu dalam kaitan patokan moral bagi penguasa, sampai sosoknya tak lebih baik dari pada sosok setan. Bukunya menjadi bahan olokan sebagai buku setan yang ditulis dengan tangan manusia.

Konsep politik Machiavelli banyak dipraktikkan di berbagai negara. Pada abad 21 ini, Machiavellianisme sangat menonjol; Napoleon Bonaparte sang diktator Prancis, senantiasa menyelipkan buku *Il Principe* di bawah bantal tidurnya. Ia

---

<sup>23</sup> Sularto ST, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek*,.....hal 105.

menyatakan bahwa karya-karya Machiavelli adalah satu-satunya karya politik yang layak dibaca. Begitu pula kepemimpinan Stalin, Hitler, dan Mussolini sangat dipengaruhi oleh gaya berfikir Machiavelli. Namun, hanya Benito Mussolini yang pernah menyatakan kekagumannya atas ajaran Machiavelli secara terang-terangan di depan publik.<sup>24</sup> Bila dilihat dari metode Machiavelli lebih spesifik, kita akan menemukan pula kesamaannya dengan metode yang dulu pernah diterapkan di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Machiavelli mengajarkan bahwa seseorang yang ingin meraih kekuasaan atau tujuan, cara apapun bisa digunakan.<sup>25</sup> Begitu juga dengan mempertahankan kekuasaan. Machiavelli mengajarkan bahwa seorang politisi harus memiliki dua sifat; yaitu sifat manusia yang tulus, penyayang, baik dan pemurah, serta sifat-sifat binatang yang jahat, kikir, licik, bengis dan kejam.

Machiavelli bukan lagi satu tokoh historis, melainkan sebagai simbol pemikiran politik. Menemukan aktualisasi pemikiran Machiavelli bukanlah hal yang mudah. Disamping faktor perbedaan konteks historis,<sup>26</sup> kesulitan juga disebabkan oleh cara pikir Machiavelli sungguh berbeda dengan sekarang. Untuk membacanya, diperlukan pemahaman yang sesuai dengan konteks historis, juga pola pikir yang khas Renaisans. Perkembangan Negara modern semakin membuat orang bertanya apakah legitimasi Negara ditentukan oleh tujuan atau cara. Tujuan selalu samar-samar, akan tetapi caranya melalui kekerasan fisik menjadi yang tidak asing lagi. Machiavelli sebenarnya tidak pernah merumuskan patokan moral tujuan menghalalkan segala

---

<sup>24</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*,.....hal 248.

<sup>25</sup> Machiavelli, Niccolo, *Il Principe*,.....hal 71.

<sup>26</sup> Sularto ST, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek*,.....hal 90.

cara. Dia hanya bermaksud mengemukakan apa yang bermanfaat bagi yang berkuasa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 2. Posisi Niccolo Machiavelli

Diperlukan cara untuk memahami posisi Machiavelli yang sesuai pada konteks historis empat ratus tahun lalu. Pola pikir Machiavelli yang khas Renaisans dapat dijadikan sebagai landasan pijak dalam memahami politiknya. Pada masa renaisans misalnya, manusia ditempatkan sebagai pokok segala sesuatu. Rasio dijadikan sebagai energi yang utama untuk melihat obyek tertentu. Pandangan tentang manusia menurut Machiavelli sudah jauh berbeda dengan sekarang.

Cara berfikir Machiavelli yang linier dapat dibuktikan bahwa, asumsi realitas politik merupakan hasil keputusan hukum sebab akibat. Hal inilah yang menjadi dasar gagasan politik Machiavelli. Sebagaimana nasehatnya kepada penguasa bahwa, untuk menjadi seorang penguasa, dibutuhkan kemampuan personal (kualitas) yang lebih, kemudian faktor keberuntungan juga bisa mendorong eksistensi penguasa tersebut.<sup>27</sup> Sebenarnya, Machiavelli berkeinginan merumuskan hukum universal tentang tindakan politik, yang dimulai dari premis ilmu alam bahwa, semua kejadian dalam alam mengikuti hukum yang sama. Ia berusaha menunjukkan bahwa ilmu politik sesuai dengan proses hukum alam.

Sekilas Machiavelli masih mengakui hukum kodrat, akan tetapi disisi lain menunjukkan ia sangat realistis, dengan tidak bisa mengabaikan kejadian-kejadian di luar pengetahuan manusia. Meskipun manusia dapat mengantisipasi masa depan,

---

<sup>27</sup> Machiavelli, Niccolo, *Il Principe*,..... hal 53.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pada tingkat tertentu ia tidak bisa meramalkan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Seperti pikiran Machiavelli,<sup>28</sup> bahwa manusia dapat bergerak mengikuti gerakannya keberuntungan. Dewa keberuntungan akan memilih manusia yang memiliki semangat dan kemampuan, sehingga manusia mampu mengenali kesempatan yang ada sebagai instrument mencapai tujuan. Demikian juga, manusia dapat menomorduakannya, akan tetapi tidak dapat melawannya. Apa yang dimaksudkan Machiavelli dengan hukum universal menjadi determinan dalam tindakan politik, begitu pula dengan tatanan sosial dan politik yang digerakkan oleh kebetulan semata. Saintisme Machiavelli, dengan pengalaman nyata manusia menjadi teka-teki besar yang harus dihadapi oleh teori politiknya.

Metode logis dan rasional yang dilakukan Machiavelli mengalami kontradiktif. Itu terlihat, dengan mengakui bahwa tindakan manusia tidak bisa sepenuhnya dapat digambarkan menurut prinsip rasio dan ilmiah.<sup>29</sup> Machiavelli mengemukakan penjelasannya dari ide pagan tentang *Fortune* (Nasib). Berangkat dari perspektif ini, manusia terikat oleh faktor-faktor normatif transendental. Machiavelli yakin, jika manusia mampu memahami peran yang dimainkan oleh *fortune* dalam putaran sejarah, niscaya ia bisa menguasai dan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Jika manusia dapat merubah wataknya dalam ruang dan waktu, *fortune* tidak akan berubah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Machiavelli, Niccolo, *Diskursus*,..... hal 290.

<sup>29</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*,..... hal 265

<sup>30</sup> Machiavelli, Niccolo, *Diskursus*,..... hal 350.

Akan tetapi seorang manusia yang terbiasa bertindak dengan satu cara, maka dia tidak akan pernah berubah, ia akan tenggelam ditelan waktu, karena tidak lagi cocok dengan cara-cara yang dipakainya. Maka dari itu, penguasa yang bisa menyesuaikan tindakannya dengan kebutuhan dan perubahan zaman, niscaya akan bisa mengendalikan dan menundukkan waktu. Walaupun demikian, metode ilmiah yang ada dalam pemikiran mistik ini, merupakan gambaran dari semangat Machiavelli untuk menjelaskan kebenaran universal dan alam semesta.

Fortuna yang semula berasal dari Thomas Aquinas (Penyelenggaraan Allah) oleh Machiavelli diartikan dengan nasib mujur. Hal ini menandakan bahwa bangunan nalar abad pertengahan masih melekat pada pemikiran Machiavelli. Akan tetapi patut dijadikan landasan pijak, bahwa Machiavelli melakukan terobosan dalam pemisahan moral dan politik. Sikapnya tentang keteraturan adalah bentuk penerimaan terhadap fortuna dengan pasrah harus impulsif direbut.<sup>31</sup> Terobosan ini masih berlanjut dengan penemuannya tentang konsep massa. Politik dipahami sebagai kegiatan personal, akan tetapi kekuasaan itu juga terkait dengan rakyat (massa). Dari pola pikir yang berbeda ini, Machiavelli akan diingat kembali ketika orang ingin memecahkan pilihan antara kesejahteraan dan kekerasan, kepentingan personal atau rakyat secara umum.

### 3. Kajian Kritis Perspektif Islam

Untuk melengkapi kajian dalam penelitian ini, ada baiknya peneliti mengupas sedikit perspektif Islam. Dalam kajian ini, konsep politik Machiavelli masih terbatas,

---

<sup>31</sup> Sularto ST, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek*,..... hal 93.



- dapat dilihat dari beberapa gagasan yang kontradiktif. Pemikiran Machiaveli di satu sisi cukup obyektif-ilmiah, di sisi lain Machiavelli tanpa sadar masih meragukai kebenaran doktrin agama. Politik memang memiliki nilai sendiri yang berbeda dengan nilai moral, akan tetapi nilai politik tersebut masih berkaitan dengan beberapa faktor eksternal. Machiavelli mengistilahkan dengan fortuna, atau faktor keberuntungan. Dan apabila ditinjau dalam perspektif islam, maka istilah fortuna merupakan gambaran dari realitas ilahiyah.

Dalam pandangan islam, politik merupakan seni estetik yang ada dalam akal dan hati nurani manusia. Akal dan kecenderungan manusia memiliki hubungan erat dengan Tuhan yang maha pencipta. Dengan demikian, disamping manusia dapat menentukan sikapnya, akan tetapi, baik buruk, berhasil dan tidak tindakan tersebut dipengaruhi faktor keberuntungan yang datang dari Tuhan.<sup>32</sup>

Lain halnya dengan konsep politik Machiavellianis, dibenarkan menggunakan cara binatang untuk mencapai sebuah tujuan kekuasaan. Konsep politik yang diusung oleh Machievelli itu merupakan pemikiran politik yang banyak digunakan oleh para pemimpin yang diktator. Konsep politik ini menghalalkan segala cara untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan. Pemikiran ini juga membenarkan sistem pemerintahan yang dijalankan penguasa bertangan besi, yang menolak pertimbangan moral dalam hal politik praktis. Oleh karena itu, para Machiavellianis dianggap sebagai sosok yang membenarkan dusta, penipuan, penindasan, dan pembunuhan,

---

<sup>32</sup> Annabhani, Taqiyyudin, *Peraturan Hidup dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Thariquul Izzah, 1993) hal 43.

masuk penguin sejarah asal stabilitas kekuasaan dapat dicapai. Horor politik Machiavelli ini pun berimbas pada kebijakan publik, regulasi, undang-undang, dan segala peraturan yang dikeluarkan lebih cenderung membela kepentingan penguasa daripada rakyat.

Tentunya, latar belakang pemikiran ini berangkat dari pemahaman yang kering dan dimensi yang dimiliki manusia. Pemikiran ini tidak mengakui akan nilai-nilai kemanusiaan dan hanya nilai-nilai hewani yang lebih menonjol. Sehingga perbuatan yang buruk pun dilakukan demi tujuan kebendaan dan hayawaniyah. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Qur'an "Mereka itu seperti hewan bahkan lebih sesat."<sup>33</sup> Konsep dasar etika politik dalam Islam berangkat dari pemahaman bahwa, manusia lahir dan hidup di muka bumi ini menyandang status ganda; sebagai hamba (makhluk sosial) dan khalifah. Kedua status ini saling berkaitan, tak bisa dipisahkan, karena manusia sebelum lahir, sudah menyatakan kehambaan kepada Tuhan Maha Pencipta.

Oleh sebab itu, status manusia sebagai khalifah di dunia haruslah dijalankan sesuai dengan visi-misi kehambaan. Lahir dengan tugas khalifah, manusia dominan dengan naluri dan kecenderungan bahkan ambisi kekuasaan, maka wajar kalau manusia menonjol dengan aktivitas politiknya. Di dalam Islam, politik dan kekuasaan akan barang terlarang, melainkan dianjurkan sejauh sejalan dengan dan untuk menjalankan visi-misi kehambaan dan kekhilafahan.

Dengan politik dan kekuasaan, tugas khilafah dapat dijalankan lebih kongkret

---

Depertemen Agama, *Al-qur'an Ala Rosmil Utsman* (Toha Putra Semarang, 1985). 47, 12.

1 efektif. Bahkan politik dan kekuasaan, merupakan instrumen atau media paling efektif untuk mendakwahkan dan menegakkan pesan-pesan Islam.<sup>34</sup> Dapat dikatakan bahwa, umat Islam dianjurkan berpolitik dan harus memegang kekuasaan adalah sti. Namun, bagaimana kekuasaan itu diraih sesuai dengan etika islami dan harus alankan sesuai dengan visi-misi kehambaan dan keislaman, adalah sesuatu yang rlu bukti.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

Annabhani, Taqiyyudin, *Peraturan Hidup*.....hal 50.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Tidak banyak yang dapat disimpulkan peneliti tentang kajian kritis konsep politik Niccolo Machiavelli. Konsep politik Niccolo Machiavelli belum banyak dipahami secara utuh. Orang hanya mengenal bahwa, Machiavelli merupakan sosok politikus yang menjunjung tinggi politik penghalal segala cara. Asumsi inilah yang menjadikan politik hanya berbicara kepentingan semata, dan tidak memiliki etika politik.

Dari pemaparan yang singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika politik sebagaimana berikut;

1. Pemikiran etika politik yang sederhana akan melahirkan pemahaman yang kontradiktif, antara politik yang berkualitas rendah atau *low politic*, dengan demikian akan mengakibatkan pemikiran dan perilaku politik yang amburadul, tanpa arah dan tujuan yang etis.

2. Begitu juga sebaliknya, etika politik dapat menjadikan politik berkualitas tinggi atau *high politic*, arah dan tujuannya lebih jelas, dengan kesadaran bahwa dalam arena politik, posisi dan kedudukan merupakan satu bentuk manifestasi dari amanah negara dan masyarakat yang diorientasikan untuk kebaikannya pula.

3. Selain bersumber dari agama, etika politik juga berangkat dari nilai-nilai lokal dimana politik tersebut beroperasi. Dengan demikian, pemisahan moral dengan

politik tidak berarti tanpa pertimbangan etika politik. Seperti halnya Machiavelli, moral diganti dengan hukum-hukum universal, sedangkan politik diatur berdasarkan hukum dan konstitusi negara.

4. Konsep politik Machiavelli tentang negara sangat menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini terlihat dari nasehatnya kepada penguasa yang menganjurkan kemakmuran negara dan mensejahterakan masyarakat harus diutamakan. Begitu juga stabilitas negara, hukum berperan didalamnya, terlepas dengan segala cara.

5. Konsep politik Machiavelli yang menghalalkan segala cara bertujuan untuk kebaikan negara. Dengan demikian, penguasa harus mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat, dan bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

6. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penguasa harus mengerti politik murni untuk kekuasaan atau politik kerakyatan. Dan konsep politik Machiavelli memiliki legitimasi etika politik; antara etika politik kekuasaan dan kerakyatan yang diusung dengan konteks politik pada waktu itu.

7. Etika politik kekuasaan dan kerakyatan saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain, tidak dapat dioperasikan secara terpisah; tindakan politik kekuasaan akan berefek kepada rakyat, begitu pula dengan politik kerakyatan secara otomatis menggunakan kekuasaan.

## B. Saran

Saran dan masukan dalam penelitian ini ditujukan kepada para politisi. Banyak politikus yang membenci gagasan politik Niccolo Machiavelli, akan tetapi pada kondisi tertentu menggunakan logika politik ala Machiavelli. Setiap orang memiliki kecenderungan politis, baik itu untuk kekuasaan maupun kerakyatan. Machiavellianisme politik seringkali diterapkan demi stabilitas kekuasaan, dan hal itu juga yang dijadikan alasan atas nama demokratisasi politik.

Sudah lama gagasan politik Machiavelli telah menjadi sumber inspirasi politik yang tak akan pernah hilang selama aktifitas politik itu masih ada. Walaupun demikian, patut disadari bahwa Machiavelli juga manusia biasa. Gagasan politik yang baik mengenal kawan dan lawan merupakan satu bentuk ekspresi diri sebagai manusia umumnya. Gagasan politik tersebut lahir dari rahim abad pencerahan, dimana realitas sosial mengalami goncangan psikis yang kuat, akibat dari keterkungkungan di zaman pertengahan.

Saran selanjutnya, terhadap negara yang menganut sistem pemerintahan republik, seperti negara republik Indonesia. Sistem pemerintahan republik akan lama bertahan, dibanding dengan sistem lain. Keyakinan Machiavelli terhadap republik merupakan pilihan yang terbaik. Di dalamnya terbuka ruang bagi rakyat untuk memperoleh kesempatan bersuara dan berpolitik, sedangkan penguasa harus berusaha mengelola persaingan antar individu-individu dan golongan. Pernyataan Machiavelli ini sudah selayaknya menjadi refleksi bagi para politisi di Indonesia yang memakai sistem pemerintahan republik.

Oleh karena itu, berkaca pada situasi sosial politik Indonesia saat ini, yang mengalami krisis multidimensi, dimana taraf berfikir rakyat stagnan. Mulai pemimpin yang tidak tegas, krisis ekonomi yang berkepanjangan, hingga perilaku politik yang mengemis kepada negara-negara asing. Atas dasar itu, maka diperlukan sosok Machiavellianis yang kuat dan tegas, mengerahkan segenap kemampuannya untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa, walaupun dengan cara-cara yang buruk.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

- Audi, Robert, *Agama Dan Nalar Sekuler Dalam Masyarakat Liberal*, Penerjemah Yusdani dkk (Yogyakarta; UII Press, 2002).
- Apter, David E, *Pengantar Analisa Politik*, Penerjemah Setiawan Abadi, Cetakan ketiga (Jakarta; LP3S, 1988).
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat* (Jakarta; Grafindo Persada, 1996).
- Annabhani, Taqiyudin, *Peraturan Hidup dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 1993)
- Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, Cetakan ketiga (Jakarta; Gramedia, 2002).
- Bertens, K, *Etika* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Balandier, Georges, *Antropologi Politik*, Penerjemah Y. Budisantoso, Catakan kedua (Jakarta; Grafindo Persada, 1996).
- Basir, Faisal, *Etika Politik; Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2003).
- Depertemen Agama, *Al-qur'an Ala Rosmil Utsman* (Toha Putra Semarang, 1985).
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Penerjemah Ahmadie Toha, Cetakan ketiga (Yogyakarta: Penerbit Firdaus, 2001).
- Lili Tjahyadi, S. P, *Hukum Dan Moral; Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta; Kanisius, 1991).
- Machiavelli, Niccolo, *Diskursus*, Penerjemah, Yudi Santoso dan Sovia VP, (Yogyakarta; Bentang Budaya, 2003).
- \_\_\_\_\_, *II Principle (Sang Pangeran)*, Penerjemah, Dwi Ekasari Aryani (Yogyakarta; Narasi, 2008).
- Magnis Suseno, Frans, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan ke 4 (Jakarta; Gramedia, 1987).
- \_\_\_\_\_, *Kuasa dan Moral*, Cetakan ketiga (Jakarta; Gramedia, 1995).
- \_\_\_\_\_, *13 Model Pendekatan Etika* (Yogyakarta; Kanisius, 1998).
- Munir Mul Khan, Abdul, *Moral Politik Santri, Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas* (Jakarta; Erlangga, 2003).
- Mallarangeng, Rizal, *Wajah Lain Machiavelli*, (Kompas; hari senin, 06 Oktober, 1997).
- Majalah MADINA (Masyarakat Dinamika Nasional), *Etika Politik dalam Al-Qur'an*, Penulis Hasan Basri Al-Mardhawi (30 Juni-06 Juli 2008).
- Noer, Deliar, *Pemikir Politik Di Negeri Barat*. (Jakarta: Gramedia, 1998).
- Pardoyo, *Sekulerisasi Dalam Polemik* (Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 1993).
- Russell, Bartrand, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosial Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Penerjemah Sigit Jatmiko dkk (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002).



- Sularto ST, *Niccolo Machiavelli Penguasa Arsitek Masyarakat* (Jakarta; Kompas, 2003).
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik; Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Penerjemah Ahmad Baidowi dkk, Cetakan kedua (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005).
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta; Gramedia, 1992).
- Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dus* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2004).
- Teichman, Jenny, *Etika Sosial*, Penerjemah A. Sudiarja, SJ (Yogyakarta, Kanisius, 1998).
- Varma, S.P, *Teori Politik Modern*, Penerjemah Yohanes Kristiarto SL, Cetakan ketiga (Jakarta; Rajawali Pers, 1992).
- Virginia, Held, *Etika Moral; Pembeneran Tindakan Sosial*, Penerjemah Drs.Y Ardy Handoko, Cetakan kedua (Jakarta; Erlangga, 1991).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id